

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

**LAPORAN KINERJA TRIWULAN III TAHUN 2020**

*Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan*

*Jakarta, Oktober 2020*



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penyusunan Laporan Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan triwulan III tahun 2020 telah dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan amanat peraturan perundang-undangan dan wujud pertanggungjawaban kinerja triwulan III tahun 2020. Selain itu, laporan kinerja juga merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, perwujudan transparansi, alat kendali dan alat pemacu sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah menerapkan metode *Balanced Scorecard* (BSC) sejak 2016 atau sekarang dikenal sebagai Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M) sebagai satu pilihan alat untuk mengelola kinerja organisasi. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sebagai unit kerja yang baru berdiri tahun 2020 secara langsung menerapkan sistem tersebut secara penuh. Dengan metode tersebut kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan diukur berdasarkan capaian atas Sasaran Strategis (SS) yang diwujudkan dalam bentuk ukuran pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU).


Dalam dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tahun 2020 telah ditetapkan 12 Sasaran Strategis yang diukur dengan 13 IKU. SS dan IKU tersebut merupakan penjabaran dari empat perspektif pendekatan *Balanced Scorecard*, yakni *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*.

Pada triwulan III tahun 2020 ini belum terdapat Rancangan Kebijakan ataupun Rancangan Rekomendasi Pengendalian Kebijakan dijanjikan untuk dicapai. Untuk penyerapan anggaran per 30 September 2020 telah terealisasi sebesar Rp 836.058.120,- atau sebesar 13,95 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp 5.994.017.000,-. Rendahnya serapan ini terutama disebabkan oleh baru ditetapkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang baru pada bulan Agustus 2020 sehingga sebagian besar kegiatan masih pada tahap persiapan. Selain itu, kondisi pandemi COVID-19 menyebabkan beberapa agenda yang telah direncanakan harus ditunda.

Tidak banyak yang dapat dianalisis terhadap capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada triwulan III ini. Meskipun demikian setidaknya telah terdapat gambaran bahwa proses pencapaian SS telah berada pada jalur yang tepat. Oleh karena itu untuk menjamin tercapainya SS dan mendorong penyerapan anggaran sesuai dengan target, maka pada triwulan – triwulan selanjutnya diminta agar seluruh unit kerja eselon II untuk dapat melakukan langkah – langkah percepatan pencapaian SS, fokus pada kegiatan yang mendorong pencapaian IKU dan memperbaiki proses administrasi keuangan.

Akhirnya semoga laporan kinerja triwulan III Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dapat bermanfaat dan dapat memberikan gambaran atas capaian program dan kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan serta sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan selama triwulan III tahun 2020. Semoga Allah SWT selalu memberikan kekuatan dan kesehatan untuk terus bekerja dan berkarya dalam mewujudkan pembangunan dan kesejahteraan bangsa khususnya di bidang pengelolaan pertambangan dan investasi.

**DEPUTI BIDANG KOORDINASI  
INVESTASI DAN PERTAMBANGAN**



**SEPTIAN HARIO SETO**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Gambar .....	iv
Daftar Tabel .....	iv
Ringkasan Eksekutif .....	vi
<b>BAB I</b> <b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A    Latar Belakang .....	1
B    Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi .....	3
C    Aspek Strategis .....	7
D    Isu Strategis .....	8
E    Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II</b> <b>PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>10</b>
A    Rencana Strategis .....	10
1    Visi .....	10
2    Misi .....	11
3    Tujuan .....	11
4    Sasaran Strategis .....	11
B    Target Kinerja .....	14
C    Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	18
D    Cascading Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 .....	20
E    Pengukuran Kinerja Tahun 2020 .....	21
<b>BAB III</b> <b>AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>28</b>
A    Capaian Kinerja Sasaran Strategis .....	28
B    Analisis Capaian Kinerja .....	31
C    Capaian Indikator Kinerja Utama .....	31
D    Realisasi Anggaran .....	32
<b>BAB IV</b> <b>PENUTUP</b> .....	<b>34</b>
Lampiran I    Perjanjian Kinerja Tahun 2020 .....	37
Lampiran II    Data Kegiatan Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan Triwulan III .....	60

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan .....	4
Gambar 2.1 Jenis Keluaran Menurut Kegiatan .....	14
Gambar 2.2 Alur Kebijakan hingga Manfaat dan Dampak .....	15
Gambar 2.3 Alur Keluaran Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan .....	16
Gambar 2.4 Simulasi Cascading IKU Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan .....	21

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Matriks Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 – 2024	13
Tabel 2.2 Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 – 2024 .....	17
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 .....	19
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Untuk Periode Triwulan III Tahun 2020 .....	28
Tabel 3.2 Pagu dan Realisasi Anggaran Unit Eselon II di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Per 30 September 2020 .....	33

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Laporan kinerja memuat pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai terhadap hasil analisis pengukuran kinerja. Dengan tujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan kinerja secara berkesinambungan, maka Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menyusun laporan kinerja triwulan III tahun 2020. Laporan kinerja ini dalam penyusunannya mengacu pada Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 yang disesuaikan dengan penerapan manajemen kinerja Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M) di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

Dokumen Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 memuat 12 Sasaran Strategis (SS) dengan empat perspektif pendekatan *Balanced Scorecard*, yakni *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Terdapat 5 (lima) SS yang merupakan bagian dari *Customer Perspective* dan terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU, yakni: (1) Jumlah Hari Dalam Memulai Usaha; (2) Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa; (3) Persentase realisasi investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN); (4) Persentase realisasi investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dan (5) Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB. Pada *Internal Business Process Perspective* terdapat 1 (satu) SS yang terdiri dari 1 (satu) IKU, yaitu persentase rancangan kebijakan di bidang investasi dan pertambangan yang dijadikan sebagai kebijakan Menteri. Terakhir, sebagai bagian dari *Learning and Growth Perspective* terdapat 4 (empat) IKU yakni (1) persentase pejabat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang memenuhi standar kompetensi jabatan, (2) Nilai PMPRB Deputi, (3) Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi dan (4) nilai IKPA Deputi.

Pengukuran kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pada triwulan III tahun 2020 ini tidak terdapat target kinerja pada tingkat Eselon I, tetapi kegiatan telah berada pada jalur yang tepat untuk menyelesaikan target kinerja di triwulan berikutnya.

Untuk membiayai pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka mencapai SS dan IKU serta pelaksanaan kegiatan dukungan administrasi pada tahun 2019, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 5.994.017.000,-. Per 30 September 2020 anggaran Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan baru terealisasi anggaran sebesar Rp 836.058.120 atau sebesar 13,59 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp 5.994.017.000. Untuk unit eselon II lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan persentase realisasi anggaran tertinggi dicapai oleh Asisten

Deputi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha sebesar Rp 211.175.929 atau sebesar 26,40 persen, sedangkan pencapaian realisasi anggaran terendah dicapai oleh Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi sebesar Rp 17.074.000 atau sebesar 1,8 persen.

Rendahnya realisasi penyerapan anggaran ini jika dianalisa dapat disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang baru ditetapkan pada bulan Agustus 2020, dikarenakan perubahan sistem pengusulan revisi anggaran yang dipengaruhi oleh penanganan COVID19 yang menjadi fokus pemerintah. *Kedua*, kondisi pandemi COVID19 yang menyebabkan ditundanya beberapa agenda dan kegiatan yang telah direncanakan, terutama terkait dengan kunjungan lapangan dan koordinasi dengan stakeholder di daerah yang terkena dampak pandemi. *Ketiga*, jumlah SDM Aparatur di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang terbatas dan masih terus dilakukan pengisian terhadap jabatan-jabatan yang kosong.

Sesuai dengan perjanjian kinerja, tidak terdapat target pada triwulan III tahun 2020 ini. Tidak banyak yang dapat dianalisa terhadap capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada triwulan III ini. Hal ini dikarenakan keseluruhan SS sedang dalam proses pencapaian melalui pelaksanaan komponen kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian. Dalam rangka mencapai target kinerja pada triwulan selanjutnya di tahun 2020 direkomendasikan untuk melaksanakan langkah-langkah antara lain melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan, melakukan integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan antar Asisten Deputi, melaksanakan perbaikan terhadap perencanaan pelaksanaan kegiatan khususnya meliputi volume dan lokasi pelaksanaan kegiatan prioritas untuk meminimalisir revisi anggaran, fokus hanya pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari target perjanjian kinerja dan melaksanakan perbaikan pada proses administrasi keuangan.



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan menjadi salah satu agenda pembangunan yang harus diwujudkan hingga tahun 2024. Perbaikan iklim dan kualitas investasi menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dinamika dan tuntutan ekonomi global yang begitu cepat berubah menjadi tantangan pada Investasi Indonesia, antara lain :

1. Dinamika politik dan perdagangan global menjadikan ketidakpastian masa depan arah ekonomi global kedepan.
2. Persaingan regional kawasan Asia Tenggara yang semakin ketat dengan pertumbuhan investasi di Vietnam, Filipina dan Kamboja.
3. Tuntutan peningkatan kualitas hidup manusia, kemandirian ekonomi dan disparitas antar wilayah.

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sebagai salah satu unit kerja di dalam Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi berdasarkan Perpres Nomor 92 tahun 2019 dan Permenko Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 tahun 2020 mengemban tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan
- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi dan pertambangan
- c. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang investasi dan pertambangan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk menjawab tantangan permasalahan investasi di Indonesia, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020-2024. Renstra memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis yang ingin dicapai. Ada tiga sasaran strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dalam upaya mendorong pencapaian kemudahan berinvestasi dan pengelolaan sumber daya alam sektor pertambangan yang berkelanjutan. *Pertama*, terwujudnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi Indonesia. *Kedua*, meningkatnya sebaran



investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata. *Ketiga*, meningkatnya manfaat ekonomi sektor pertambangan.

Dalam upaya mewujudkan sasaran strategis tersebut, maka program dan kegiatan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan selanjutnya difokuskan pada perwujudan tugas dan fungsi unit kerja Asisten Deputy di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Terdapat tujuh kegiatan utama pada Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. *Pertama*, koordinasi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi. *Kedua*, koordinasi investasi bidang jasa. *Ketiga*, koordinasi investasi strategis. *Keempat*, koordinasi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha. *Kelima*, koordinasi pertambangan. *Keenam*, penyelenggaraan pelayanan kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Selanjutnya untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Asisten Deputy tentu tidak dapat bekerja sendiri. Untuk itu diperlukan dukungan administrasi, tata usaha, keuangan, dan kepegawaian dalam bentuk layanan kesekretariatan (program, tata usaha dan pelaporan) yang disediakan oleh Sekretariat Deputy. Mempedomani Renstra Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020-2024, layanan kesekretariatan tersebut berfokus kepada aspek sumber daya manusia berbasis kompetensi; struktur organisasi efektif dan efisien; sistem informasi yang terintegrasi dan ketersediaan data/informasi yang cepat, akurat dan komprehensif; serta kinerja yang akuntabel.

Program dan kegiatan utama serta dukungan administrasi tersebut telah dituangkan dalam dokumen rencana kerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tahun 2020 dan telah memperoleh alokasi anggaran di DIPA Satuan Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut kemudian tercermin pada kinerja Deputy. Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan diukur dari pencapaian sasaran strategis atau *outcome* program dan *output* kegiatan yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengelolaan program kerja sektor/lintas sektor di bidang penanaman modal serta pertambangan secara optimal. Meningkatnya pengelolaan program kerja tersebut merupakan indikasi dari berfungsinya keluaran-keluaran (*outputs*) yang dihasilkan oleh unit kerja eselon II di lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Untuk mengukur kinerja tersebut langkah awalnya adalah menetapkan kinerja tahunan yang ingin dicapai dari sasaran strategis Deputy berikut indikator kinerjanya. Untuk tahun 2020 telah ditetapkan Perjanjian Kinerja bagi Deputy Bidang Investasi dan Pertambangan, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, fungsional dan staf.

Perjanjian kinerja pada dasarnya merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus ditetapkannya perjanjian kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur, serta sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Perjanjian kinerja memuat sasaran strategis, indikator, dan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun berkenaan.

Target kinerja ini selanjutnya perlu dipantau pencapaiannya. Dengan kata lain, setelah perjanjian kinerja ditetapkan, maka selanjutnya perlu dilakukan pengukuran kinerja.

Mulai tahun 2016, pengukuran kinerja di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah menggunakan sistem *Balanced Scorecard* (BSC) atau sekarang lebih dikenal sebagai Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M). SIK-M merupakan sistem pengukuran kinerja yang memungkinkan suatu organisasi untuk menterjemahkan visi, misi, dan sasaran strategis menjadi aksi yang terukur. Kelebihan pengukuran kinerja dengan menggunakan SIK-M adalah tidak hanya mengukur kinerja secara tradisional dari sisi keuangan saja tetapi juga dari sisi *internal business process, learning and growth, dan customer perspective*. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang merupakan unit kerja baru terbentuk pada tahun 2020 dan langsung mengadopsi sistem ini pada seluruh unit kerja eselon II lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Selanjutnya sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja, hasil pengukuran kinerja ini secara berkala (triwulan) dan tahunan dituangkan dalam bentuk dokumen laporan kinerja.

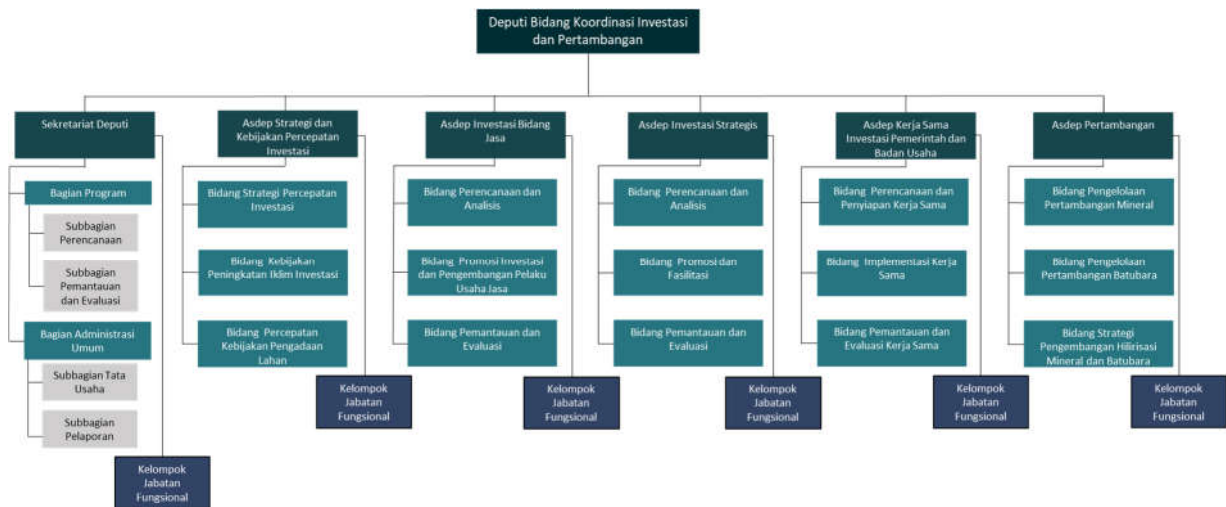
Tidak hanya sebagai alat pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi, laporan kinerja juga merupakan alat penilaian kinerja secara kuantitatif, perwujudan transparansi, alat kendali, dan alat pemacu sebagai umpan balik untuk meningkatkan kinerja semua unit kerja di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Selain itu, penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja juga merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.

## **B. Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan merupakan unit kerja eselon I yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator dan dipimpin oleh Deputi, dengan susunan organisasi yang terdiri atas :

- a. Sekretariat Deputi
- b. Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi
- c. Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa
- d. Asisten Deputi Investasi Strategis
- e. Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha
- f. Asisten Deputi Pertambangan.

Susunan organisasi Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan terlihat pada Gambar 1.1



Gambar 1.1 Susunan Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

Deputy Director of Investment and Mining Coordination has the task of organizing coordination and synchronization of formulation, determination, and implementation as well as control of implementation of policies of the Ministry/Agency related to issues in the investment and mining sectors.

In carrying out its duties, the Deputy Director of Investment and Mining Coordination organizes the following functions:

- coordination and synchronization of formulation, determination, and implementation of policies of the Ministry/Agency related to issues in the investment and mining sectors
- control of implementation of policies of the Ministry/Agency related to issues in the investment and mining sectors
- monitoring, analysis, evaluation, and reporting in the investment and mining sectors
- implementation of other functions given by the Coordinating Minister.

### Sekretariat Deputy

The Deputy Secretary has the task of implementing coordination of task implementation and providing administrative support to all organizational elements in the Deputy Director of Investment and Mining Coordination. In carrying out its duties, the Deputy Secretary organizes the following functions:

- coordination of program planning, activities, and budgeting
- monitoring, analysis, and evaluation of programs, budgets, and performance
- provision of data management and information system support

- d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan, dan keuangan
- e. pemberian dukungan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara
- f. koordinasi penyusunan laporan
- g. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

#### **Asisten Deputy Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi**

Asisten Deputy Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi dan kebijakan percepatan investasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputy Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi percepatan investasi, kebijakan peningkatan iklim investasi, dan percepatan kebijakan pengadaan lahan
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi percepatan investasi, kebijakan peningkatan iklim investasi, dan percepatan kebijakan pengadaan lahan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang strategi percepatan investasi, kebijakan peningkatan iklim investasi, dan percepatan kebijakan pengadaan lahan.

#### **Asisten Deputy Investasi Bidang Jasa**

Asisten Deputy Investasi Bidang Jasa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi bidang jasa. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputy Investasi Bidang Jasa menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan analisis investasi bidang jasa, promosi investasi dan pengembangan pelaku usaha jasa, serta pemantauan dan evaluasi investasi bidang jasa
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan analisis investasi bidang jasa, promosi investasi dan pengembangan pelaku usaha jasa, serta pemantauan dan evaluasi investasi bidang jasa

- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan analisis investasi bidang jasa, promosi investasi dan pengembangan pelaku usaha jasa, serta pemantauan dan evaluasi investasi bidang jasa

#### **Asisten Deputi Investasi Strategis**

Asisten Deputi Investasi Strategis mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang investasi strategis. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Investasi Strategis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan analisis investasi strategis, promosi dan fasilitasi investasi strategis, serta pemantauan dan evaluasi investasi strategis
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan analisis investasi strategis, promosi dan fasilitasi investasi strategis, serta pemantauan dan evaluasi investasi strategis
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan analisis investasi strategis, promosi dan fasilitasi investasi strategis, serta pemantauan dan evaluasi investasi strategis.

#### **Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha**

Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan penyiapan kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, implementasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perencanaan dan penyiapan kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, implementasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan dan penyiapan kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha, implementasi kerja sama investasi

pemerintah dan badan usaha, serta pemantauan dan evaluasi kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha.

### **Asisten Deputi Pertambangan**

Asisten Deputi Pertambangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertambangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Pertambangan menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan pertambangan mineral, pengelolaan pertambangan batubara, serta strategi pengembangan hilirisasi mineral dan batubara
- b. pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan pertambangan mineral, pengelolaan pertambangan batubara, serta strategi pengembangan hilirisasi mineral dan batubara
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang bidang pengelolaan pertambangan mineral, pengelolaan pertambangan batubara, serta strategi pengembangan hilirisasi mineral dan batubara.

### **C. Aspek Strategis**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan mempunyai aspek strategis untuk meningkatkan kemudahan dan kualitas investasi serta nilai tambah sektor pertambangan. Aspek strategis ini dicapai melalui koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang strategi dan kebijakan percepatan investasi, investasi bidang jasa, investasi strategis, kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha dan pertambangan dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dan Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 – 2024. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian isu-isu strategis di bidang investasi dan pertambangan diarahkan untuk mempercepat:

1. Perbaiki iklim investasi dan kualitas investasi
2. Memperbaiki defisit transaksi berjalan
3. Meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia
4. Penanaman modal dalam negeri dan *Foreign Direct Investment* (FDI)
5. Meningkatkan nilai tambah sumber daya alam khususnya mineral dan batu bara.

Aspek strategis tersebut diwujudkan dengan melalui perbaikan tata kelola yang baik dan tercapainya kinerja target kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang sudah ditetapkan, yaitu dengan pencapaian Sasaran Strategis berikut:

1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi Indonesia
2. Meningkatnya sebaran investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata
3. Meningkatnya manfaat ekonomi sektor pertambangan

#### **D. Isu Strategis**

Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan berperan dalam mewujudkan tercapainya ekonomi Indonesia yang berdaya saing dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam melalui penyelesaian permasalahan, penyusunan regulasi, dan perbaikan kebijakan di bidang investasi dan pertambangan. Dalam upaya mewujudkan sasaran strategis Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, maka program kerja dan kegiatan ditekankan pada:

1. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian strategi dan kebijakan percepatan investasi
2. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan investasi bidang jasa
3. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan investasi strategis
4. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan kerja sama investasi pemerintah dan badan usaha
5. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan pertambangan

Kelima program kerja dan kegiatan ini adalah program dan kegiatan unit eselon II pada Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Program dan kegiatan tersebut di atas selanjutnya dijabarkan menjadi kebijakan strategis tahun 2020 sebagai berikut:

1. Koordinasi Kebijakan Integrasi Sistem Perizinan
2. Koordinasi Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi
3. Koordinasi Kebijakan Penyelesaian Sengketa
4. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Perencanaan dan Analisis Investasi Bidang Jasa
5. Koordinasi Kebijakan Promosi Investasi dan Pengembangan Pelaku Usaha Jasa
6. Koordinasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Investasi Sektor Jasa
7. Koordinasi Kebijakan Pengembangan Perencanaan dan Analisis Investasi Strategis
8. Koordinasi Kebijakan Promosi Investasi dan Fasilitasi Investasi Strategis
9. Koordinasi Kebijakan Monitoring dan Evaluasi Investasi Strategis
10. Koordinasi Kebijakan Pengembangan perencanaan proyek kerjasama investasi pemerintah dan badan usaha
11. Koordinasi Kebijakan implementasi penjajakan minat pasar kerjasama investasi pemerintah dan badan usaha

12. Koordinasi Kebijakan monitoring dan evaluasi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha
13. Koordinasi Kebijakan Tatakelola Pertambangan dan Peningkatan Nilai Tambah Mineral
14. Koordinasi Kebijakan Tatakelola Pertambangan dan Peningkatan Nilai Tambah Batu bara
15. Koordinasi Kebijakan Strategi Perencanaan dan Pengembangan Hilirisasi Mineral dan Batu Bara

#### **E. Sistematika Penulisan**

Laporan Kinerja ini secara umum menginformasikan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada triwulan III tahun 2020. Celah kinerja (*performance gap*) dapat diidentifikasi dengan cara membandingkan antara capaian kinerja (*performance results*) pada triwulan III tahun 2020 dengan rencana kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan.

Untuk memudahkan pemahaman, maka sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Bab I: Pendahuluan. Bab satu menyajikan penjelasan umum mengenai kedudukan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, identifikasi aspek strategis dan isu strategis yang merupakan masalah yang dihadapi, dan sistematika penulisan.
- b. Bab II: Perencanaan Kinerja. Bab ini menjelaskan secara ringkas keterkaitan antar dokumen perencanaan dan penentuan indikator-indikator yang tertuang dalam dokumen perencanaan dan perjanjian kinerja. Bab ini terdiri dari rencana strategis, target kinerja, perjanjian kinerja dan pengukuran kinerja.
- c. Bab III: Akuntabilitas Kinerja. Bab ini menjelaskan capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Alam dan Jasa disertai dengan analisis keberhasilan pencapaian kinerja Sasaran Strategis untuk periode triwulan III tahun 2020 berikut dengan realisasi anggaran yang dipergunakan untuk mencapai kinerja tersebut.
- d. Bab IV: Penutup. Bab ini sebagai penutup yang akan menguraikan kesimpulan terhadap pencapaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan untuk periode triwulan III tahun 2020. Bab ini juga memuat rekomendasi untuk perbaikan bagi triwulan selanjutnya.





## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. Rencana Strategis**

##### **1. Visi**

Visi merupakan keadaan masa depan yang diinginkan oleh suatu organisasi. Visi mengandung kondisi ideal dan harus diwujudkan melalui pelaksanaan misi yang tepat.

Menteri/Pimpinan Lembaga harus memiliki Visi dan Misi Kementerian/Lembaga yang selaras dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Hal tersebut sesuai arahan Presiden yang disampaikan pada Sidang Kabinet Paripurna pada tanggal 24 Oktober 2019 dan ditegaskan kembali pada Sidang Kabinet Paripurna RPJMN pada tanggal 14 November 2019 dan Presiden menugaskan Kementerian PPN/Bappenas sebagai Clearing House untuk melihat konsistensi antara Renstra K/L, RPJMN, serta Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden. Terkait dengan hal tersebut dan sejalan dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Surat Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024.

Visi Presiden dan Wakil Presiden 2020-2024 adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”. Untuk terwujudnya Visi Presiden dan Wakil Presiden, maka ditetapkan visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu Indonesia, Pusat Peradaban Maritim Dunia Untuk Mewujudkan “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”

Sehingga sebagai unit kerja yang mendukung tugas Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, maka diformulasikan visi Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang selaras dengan Visi Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yaitu :

**Investasi Berkualitas menuju Indonesia Berdaya Saing untuk Mewujudkan  
“Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia”**

Visi Investasi berkualitas menuju Indonesia Berdaya Saing merupakan implementasi Visi Presiden RI dan Visi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi. Visi ini

dapat dimaknai sebagai bentuk mendukung terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.

## **2. Misi**

Misi diperlukan dalam upaya mewujudkan visi, Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan berkontribusi pada Misi Presiden dan Wakil Presiden ke-2 (Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing) dan ke-3 (Pembangunan yang merata dan berkeadilan) dari 9 (sembilan) Misi Presiden dan Wakil Presiden, dengan uraian sebagai berikut :

1. Menjalankan koordinasi, sinkronisasi dalam penyusunan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang investasi yang produktif dan berdaya saing.
2. Menjalankan koordinasi, sinkronisasi dalam penyusunan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pertambangan yang mampu mendorong hilirisasi sumber daya alam.

Kedua misi ini akan dijalankan selaras dengan tugas dan fungsi Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang diharapkan mampu mendorong pembangunan nasional khususnya terkait bidang Investasi dan Pertambangan.

## **3. Tujuan**

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan, maka tujuan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020-2024 adalah:

1. Mewujudkan investasi yang berkualitas dan merata bagi pertumbuhan ekonomi nasional
2. Mewujudkan tata kelola hulu hingga hilir pertambangan yang mampu mendukung nilai tambah industri maritim.

## **4. Sasaran Strategis**

Sasaran Strategis merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari satu atau beberapa program. Sasaran Strategis yang dirumuskan sama dengan sasaran pembangunan yang ada dalam Renstra Kementerian tahun 2020 - 2024, RPJMN tahun 2020-2024 maupun RPJPN tahun 2005-2025 sesuai dengan tugas dan fungsi masing – masing dari sasaran pembangunan yang terdapat pada RPJMN tetapi tetap sesuai dengan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.

Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan diharapkan mendukung pencapaian sasaran Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yaitu “Terwujudnya pemerataan pembangunan ekonomi berbasis kemaritiman yang seimbang dan dinamis” serta “Meningkatnya produksi barang dan jasa serta nilai tambah sumber daya alam” sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Kementerian Tahun 2020 –

2024. Dengan mempertimbangkan sasaran tersebut, Visi dan Misi Presiden Tahun 2020 – 2024 serta tujuan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, maka dirumuskan sasaran strategis Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tahun 2020 – 2024 adalah :

1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi Indonesia
2. Meningkatnya sebaran investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata
3. Meningkatnya manfaat ekonomi sektor pertambangan

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menetapkan sasaran program yang menggambarkan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sebagai berikut :

1. Terwujudnya kemudahan perizinan yang mampu mendorong pertumbuhan investasi
2. Meningkatnya nilai investasi bidang jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah
3. Meningkatnya investasi strategis yang menggerakkan ekonomi nasional
4. Meningkatnya kontribusi badan usaha dalam pembangunan nasional
5. Meningkatnya produksi dan nilai tambah pertambangan

Dalam rangka pencapaian sasaran – sasaran program tersebut dibutuhkan upaya – upaya internal, pembelajaran dan pertumbuhan sebagai berikut :

1. Efektifitas rumusan kebijakan di bidang investasi dan pertambangan
2. Tersedianya SDM yang kompeten di Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan
3. Terbentuknya tata kelola kelembagaan Deputy bidang investasi & pertambangan yang baik
4. Terlaksananya administrasi keuangan yang akuntabel di Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan

Keterkaitan Visi, Misi dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020-2024 dapat dilihat pada tabel 2.1.

**Tabel 2.1**

**Keterkaitan Visi, Misi dengan Tujuan dan Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020-2024**

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran Strategis
<b>Investasi berkualitas menuju Indonesia Berdaya Saing untuk mewujudkan “Indonesia Pusat Peradaban Maritim Dunia”</b>	Menjalankan koordinasi, sinkronisasi dalam penyusunan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang investasi yang produktif dan berdaya saing.	Mewujudkan investasi yang berkualitas dan merata bagi pertumbuhan ekonomi nasional	1. Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi Indonesia  2. Meningkatnya sebaran investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata
	Menjalankan koordinasi, sinkronisasi dalam penyusunan kebijakan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pertambangan yang mampu mendorong hilirisasi sumber daya alam	Mewujudkan tata kelola hulu hingga hilir pertambangan yang mampu mendukung nilai tambah industri maritim	3. Meningkatnya manfaat ekonomi sektor pertambangan

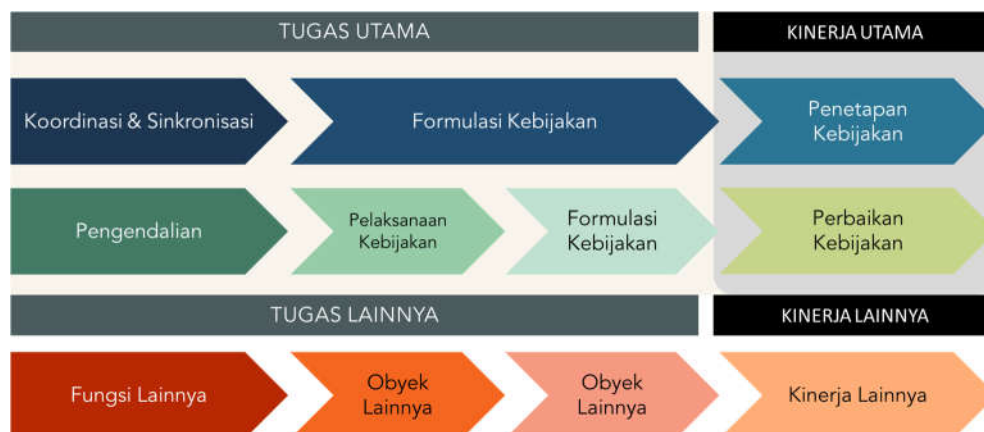
Sumber: Rencana Strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 - 2024

## B. Target Kinerja

Berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dijelaskan bahwa Kemenko Marves mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemaritiman dan investasi. Selanjutnya pada unit Eselon I, sesuai dengan kewengannya pada pasal 8 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Standar Keluaran Kebijakan Kemaritiman di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman disebutkan bahwa dalam pengelolaan kebijakan terdapat dua fungsi yaitu :

- a. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan kementerian / lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman
- b. Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian / lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman

Selain kedua fungsi tersebut, Deputi dapat pula melaksanakan tugas lainnya yang berupa penugasan khusus baik dari Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi maupun Presiden sebagai tindak lanjut sidang kabinet. Gambar 2.1 menjelaskan jenis keluaran menurut kegiatan yang terlaksana baik di level Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi maupun pada level eselon I.



**Gambar 2.1 Jenis Keluaran Menurut Kegiatan**

Sumber : Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan diukur dari pencapaian sasaran strategis atau outcome program yang ditunjukkan dengan meningkatnya pengelolaan program kerja sektor/lintas sektor di bidang strategi dan kebijakan percepatan investasi, investasi bidang jasa, investasi strategis, kerjasama investasi pemerintah dan badan usaha, dan pertambangan secara optimal. Meningkatnya pengelolaan program kerja tersebut merupakan indikasi dari berfungsinya keluaran-keluaran (*outputs*) yang disampaikan oleh unit eselon II di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

Target kinerja yang ditetapkan unit eselon I merupakan identifikasi dan analisis sisi mitra (*stakeholder*) yang akan merupakan manfaat dan dampak (*impact*). Lalu, kebutuhan pelanggan (*customers*) baik dari segi jumlah maupun jenis keluaran hasilnya (*outcome*). Untuk mewujudkan hasil (*outcome*) dimaksud, unit eselon I menugaskan unit eselon II sebagai penanggung jawab pelaksana pembuatan keluaran (*output*). Unit eselon II mengupayakan pembuatan keluaran tersebut dengan menentukan tahapan proses kegiatan pelaksanaannya sesuai dengan waktu yang diharapkan, seperti terlihat pada Gambar 2.2.

## DARI KEBIJAKAN KE INDIKATOR MAKRO STRATEGIS



**Gambar 2.2 Alur Kebijakan hingga Manfaat dan Dampak**

**Sumber : Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi**

Pada Gambar 2.3 menjelaskan mengenai alur keluaran kegiatan pada Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan mulai level bidang sampai level pemerintah dan Kementerian/Lembaga. Pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan bidang sumber daya alam dan jasa dimulai dari unit eselon III (bidang). Unit ini berfungsi untuk menghimpun bahan kebijakan. Bahan kebijakan ini selanjutnya diolah, dianalisis, dan dirumuskan menjadi rumusan kebijakan pada level unit eselon II (asisten deputy). Rumusan kebijakan yang dihasilkan tersebut dipilah dan disusun menjadi rancangan kebijakan deputy. Rancangan kebijakan yang telah dihasilkan oleh deputy, selanjutnya dibawa ke level Menteri Koordinator. Pada level ini, rancangan tersebut ditetapkan menjadi kebijakan atau program Kementerian Koordinator atau menjadi rekomendasi Menteri Koordinator untuk menjadi kebijakan dan program pemerintah dan atau Kementerian/Lembaga.



**Gambar 2.3 Alur Kegiatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan**  
**Sumber : Biro Perencanaan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi**

Output rancangan kebijakan pada tingkat Kedeputian dapat berupa dokumen ringkasan kebijakan dan rancangan kebijakan. Dalam hal sinkronisasi dan koordinasi perumusan dan penetapan kebijakan, konsep kebijakan dapat berupa :

- Rancangan peraturan perundang – undangan
- Rancangan kelembagaan
- Rancangan perencanaan program
- Rancangan kebijakan yang terkait
- Rancangan kebijakan lainnya seperti rancangan kertas posisi, rancangan buku putih dan rancangan dokumen lainnya yang relevan

Dalam hal pengendalian pelaksanaan kebijakan, konsep kebijakan dapat berupa rancangan keputusan. Selanjutnya dokumen rancangan kebijakan ini menjadi bahan pertimbangan Menteri Koordinator dalam menerbitkan rekomendasi dan/atau menetapkan kebijakan.

Berdasarkan kepada alur keluaran dan tingkatan keluaran kebijakan regulatif sebagaimana telah dipaparkan serta dengan berpedoman kepada visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan selama periode 2020 – 2024 yang telah diuraikan pada Bab II, maka dapat disusun indikator kinerja dan target yang ingin dicapai oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan. Sasaran strategis dan indikator kinerja berikut target selama lima tahun ke depan disajikan pada tabel 2.2.



**Tabel 2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama  
Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020 - 2024**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET					
			2020	2021	2022	2023	2024	
<b>Stakeholder Perspective</b>								
SS.1	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi Indonesia	1	Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia ( <i>Ease of Doing Business</i> )	60	56	51	45	40
SS.2	Meningkatnya sebaran investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata	2	Persentase Investasi di Luar Jawa	45,6%	46,2%	47,4%	48,5%	49,67 %
SS.3	Meningkatnya manfaat ekonomi sektor pertambangan	3	Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan	27,1%	27,3%	27,3%	27,5%	27,5%
<b>Customer Perspective</b>								
SS.4	Terwujudnya kemudahan perizinan yang mampu mendorong pertumbuhan investasi	4	Jumlah Hari Dalam Memulai Usaha	8 Hari	6 Hari	6 Hari	4 Hari	3 Hari
SS.5	Meningkatnya nilai investasi bidang jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah	5	Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa	3%	3,5%	4%	4,5%	5%
SS.6	Meningkatnya investasi strategis yang menggerakkan ekonomi nasional	6	Persentase realisasi investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN)	85%	85%	90%	90%	90%
SS.7	Meningkatnya kontribusi badan usaha dalam pembangunan nasional	7	Persentase realisasi investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	85%	85%	90%	90%	90%
SS.8	Meningkatnya produksi dan nilai tambah ekspor pertambangan	8	Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	1,0%
<b>Internal Business Process Perspective</b>								
SS.9	Efektifitas Rumusan Kebijakan di bidang investasi dan	9	Persentase rancangan kebijakan di bidang investasi dan pertambangan yang	100%	100%	100%	100%	100%



	pertambahan		dijadikan sebagai kebijakan Menteri					
<b>Learning And Growth Perspective</b>								
<b>SS.10</b>	Tersedianya SDM yang kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	10	Persentase Pejabat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang memenuhi standar kompetensi jabatan	80%	80%	85%	85%	90%
<b>SS.11</b>	Terbentuknya Tata Kelola Kelembagaan Deputi bidang investasi dan pertambangan yang Baik	11	Nilai PMPRB Deputi	60	65	70	75	80
		12	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi	65	67	70	75	80
<b>SS.12</b>	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	13	Nilai IKPA Deputi	70	75	80	85	90

### C. Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Pada prinsipnya penyusunan perjanjian kinerja sedikitnya memiliki lima tujuan. Pertama, perjanjian kinerja merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur. Kedua, untuk menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur. Ketiga, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Keempat, sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah. Terakhir, sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Pada tahun 2020, dengan tujuan sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya dan dengan mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka pada bulan Agustus 2020 telah ditandatangani Perjanjian Kinerja antara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman selaku pemberi amanah dengan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan untuk tahun 2020. Perjanjian Kinerja tersebut memuat 12 (dua belas) Sasaran

Strategis (SS) dengan empat perspektif pendekatan Balanced Scorecard (BSC), yakni *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. *Stakeholder Perspective* memiliki 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu : (1) Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (*Ease of Doing Business*); (2) Persentase Investasi di Luar Jawa; dan (3) Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan. Terdapat 5 (lima) SS yang merupakan bagian dari *Customer Perspective* dan terdiri dari 5 (lima) Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU, yakni: (1) Jumlah Hari Dalam Memulai Usaha; (2) Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa; (3) Persentase realisasi investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN); (4) Persentase realisasi investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha dan (5) Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB.

Pada bagian dari *Internal Business Process Perspective* terdapat 1 (satu) SS yang terdiri dari 1 (satu) IKU. SS tersebut, yakni tersedianya efektifitas rumusan kebijakan di bidang investasi dan pertambangan dengan IKU-nya, yaitu persentase rancangan kebijakan di bidang investasi dan pertambangan yang dijadikan sebagai kebijakan Menteri.

Pada bagian dari *Learning and Growth Perspective* terdapat 3 (tiga) SS. SS yang pertama adalah tersedianya SDM yang kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, yakni persentase pejabat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang memenuhi standar kompetensi jabatan. SS yang kedua adalah terbentuknya tata kelola kelembagaan Deputi Bidang Investasi dan Pertambangan yang baik, yakni (1) Nilai PMPRB Deputi dan (2) Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi. Kemudian SS yang ketiga adalah terlaksananya administrasi keuangan yang akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dengan IKU-nya, yakni nilai IKPA Deputi.

**Tabel 2.3**

**Perjanjian Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020**

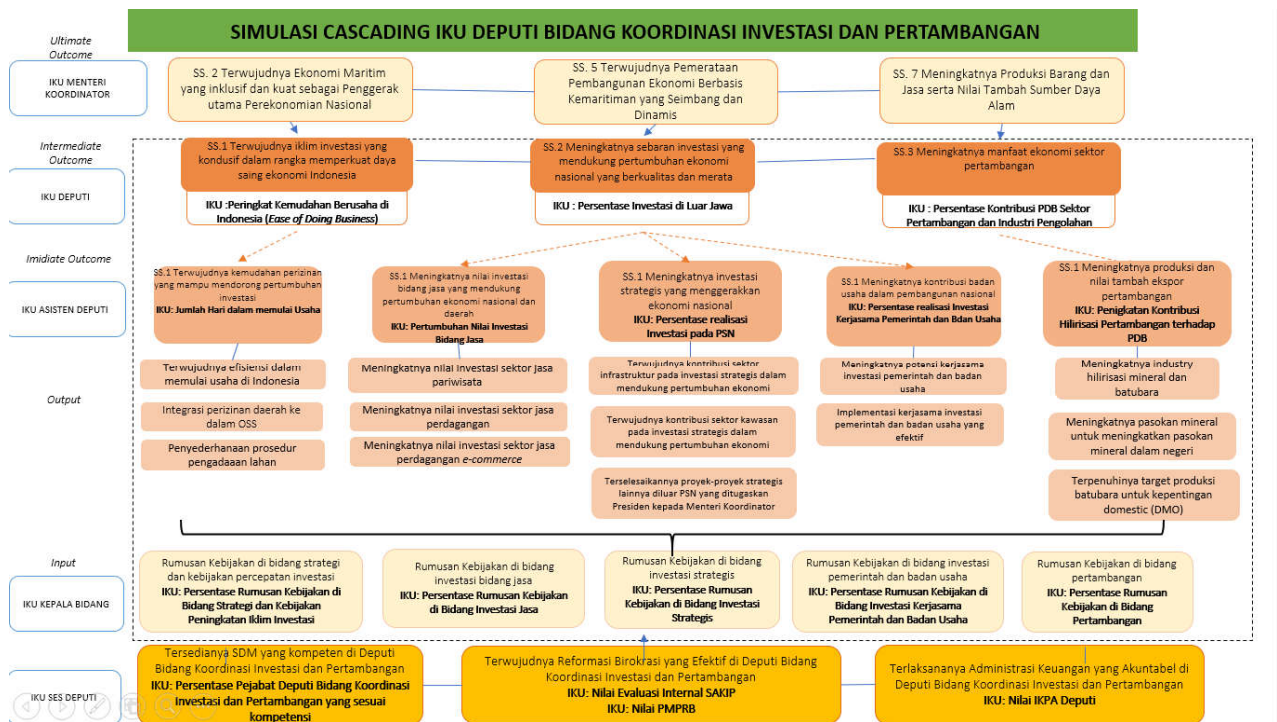
NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
<b><i>Stakeholder Perspective</i></b>				
SS.1	Terwujudnya iklim investasi yang kondusif dalam rangka memperkuat daya saing ekonomi Indonesia	1	Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia ( <i>Ease of Doing Business</i> )	60
SS.2	Meningkatnya sebaran investasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas dan merata	2	Persentase Investasi di Luar Jawa	45,6%
SS.3	Meningkatnya manfaat ekonomi sektor pertambangan	3	Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan	27,1%
<b><i>Customer Perspective</i></b>				
SS.4	Terwujudnya kemudahan perizinan	4	Jumlah Hari Dalam Memulai Usaha	8 Hari

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET 2020
	yang mampu mendorong pertumbuhan investasi			
SS.5	Meningkatnya nilai investasi bidang jasa yang mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah	5	Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa	3%
SS.6	Meningkatnya investasi strategis yang menggerakkan ekonomi nasional	6	Persentase realisasi investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN)	85%
SS.7	Meningkatnya kontribusi badan usaha dalam pembangunan nasional	7	Persentase realisasi investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	85%
SS.8	Meningkatnya produksi dan nilai tambah ekspor pertambangan	8	Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB	0,8%
<b>Internal Business Process Perspective</b>				
SS.9	Efektifitas Rumusan Kebijakan di bidang investasi dan pertambangan	9	Persentase rancangan kebijakan di bidang investasi dan pertambangan yang dijadikan sebagai kebijakan Menteri	100%
<b>Learning And Growth Perspective</b>				
SS.10	Tersedianya SDM yang kompeten di Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	10	Persentase Pejabat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang memenuhi standar kompetensi jabatan	80%
SS.11	Terbentuknya Tata Kelola Kelembagaan Deputy bidang investasi dan pertambangan yang Baik	11	Nilai PMPRB Deputy	60
		12	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy	65
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	13	Nilai IKPA Deputy	70

Sumber: Dokumen Perjanjian Kerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, 2020.

#### D. Cascading Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam menentukan target dan pencapaian realisasi indikator kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, setiap unit kerja mempunyai indikator kinerja utama. Selanjutnya penjabaran indikator kinerja Eselon I dijabarkan kedalam indikator kinerja eselon dibawahnya, penjabaran ini akan mempermudah penilaian atas capaian yang dihasilkan dari masing-masing unit kerja dalam pencapaian tujuan. Simulasi capaian indikator kinerja utama dapat dilihat pada Gambar 2.4 berikut:



Gambar 2.4 Simulasi Cascading IKU Deputy Bidang Koordinasi Investasi Dan Pertambangan

## E. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan tahun 2020 dihitung dengan formulasi untuk masing-masing IKU sebagai berikut:

IKU 1: Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (*Ease of Doing Business*)

IKU 1 dihitung dengan cara membandingkan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Formulasi indeks capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 1 adalah:

<b>Merah</b>	<b>Kuning</b>	<b>Hijau</b>
$X < 50 \%$	$50 \% \leq X < 80 \%$	$80 \% \leq X \leq 100 \%$

Tidak memenuhi target

Belum memenuhi target

Memenuhi target

#### IKU 2: Persentase Investasi di Luar Jawa

IKU 2 dihitung dengan cara membandingkan persentase investasi di luar Jawa yang dilaksanakan para pemangku kepentingan dibandingkan dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Indeks capaian IKU ini dihitung dengan formula:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 2 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
$X < 50 \%$	$50 \% \leq X < 80 \%$	$80 \% \leq X \leq 100 \%$
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

#### IKU 3: Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan

IKU 3 ini dihitung sesuai persentase kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan setiap triwulan atau tahun yang kemudian dibandingkan dengan target kerjanya. Formulasi perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 3 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
$X < 50 \%$	$50 \% \leq X < 80 \%$	$80 \% \leq X \leq 100 \%$
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

#### IKU 4: Jumlah Hari Dalam Memulai Usaha

IKU 4 dihitung dengan cara membandingkan jumlah hari dalam memulai usaha yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Formulasi indeks capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 4 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

#### IKU 5: Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa

IKU 5 dihitung dengan cara membandingkan pertumbuhan nilai investasi bidang jasa yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Formulasi indeks capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 5 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

#### IKU 6: Persentase realisasi investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN)

IKU 6 dihitung dengan cara membandingkan persentase realisasi investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Formulasi indeks capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 6 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 7: Persentase realisasi investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha

IKU 7 dihitung dengan cara membandingkan persentase realisasi investasi kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Formulasi indeks capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 7 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

IKU 8: Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB

IKU 8 dihitung dengan cara membandingkan peningkatan kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB yang menjadi dasar penerbitan kebijakan para pemangku kepentingan dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Formulasi indeks capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 8 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

**IKU 9: Persentase Rancangan Kebijakan Di Bidang Investasi Dan Pertambangan yang dijadikan sebagai Kebijakan Menteri**

IKU 9 dihitung dengan cara membandingkan rancangan kebijakan di bidang investasi dan pertambangan yang dihasilkan dengan rancangan kebijakan yang dijadikan kebijakan Menteri dengan target triwulan atau tahunan pada perjanjian kinerja. Formulasi indeks capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 9 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
X < 50 %	50 % ≤ X < 80 %	80 % ≤ X ≤ 100 %
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

**IKU 10: Persentase Pejabat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan**

IKU 10 ini dihitung sesuai persentase pejabat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang memenuhi standar kompetensi jabatan setiap triwulan atau tahun yang kemudian dibandingkan dengan target kinerjanya. Formulasi perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 10 adalah:

Merah	Kuning	Hijau
-------	--------	-------



$X < 50 \%$	$50 \% \leq X < 80 \%$	$80 \% \leq X \leq 100 \%$
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

#### IKU 11: Nilai PMPRB Deputy

IKU 11 ini dihitung sesuai nilai hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada tahun ini yang kemudian dibandingkan dengan target kinerjanya. Formulasi perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 11 adalah:

<b>Merah</b>	<b>Kuning</b>	<b>Hijau</b>
$X < 50 \%$	$50 \% \leq X < 80 \%$	$80 \% \leq X \leq 100 \%$
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

#### IKU 12: Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy

IKU 12 ini dihitung sesuai nilai evaluasi internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada tahun ini yang kemudian dibandingkan dengan target kinerjanya. Formulasi perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 12 adalah:

<b>Merah</b>	<b>Kuning</b>	<b>Hijau</b>
$X < 50 \%$	$50 \% \leq X < 80 \%$	$80 \% \leq X \leq 100 \%$
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target

### IKU 13: Nilai IKPA Deputi

IKU 13 ini dihitung sesuai nilai Indikator Kinerja Pengelolaan Anggaran (IKPA) Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada tahun ini yang kemudian dibandingkan dengan target kerjanya. Formulasi perhitungan IKU ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Indeks Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100 \%$$

Sesuai dengan pengaturan pengukuran kinerja pada aplikasi SIK-M, maka pemberian warna dan interpretasi indeks capaian IKU 13 adalah:

<b>Merah</b>	<b>Kuning</b>	<b>Hijau</b>
$X < 50 \%$	$50 \% \leq X < 80 \%$	$80 \% \leq X \leq 100 \%$
Tidak memenuhi target	Belum memenuhi target	Memenuhi target



## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Untuk kepentingan akuntabilitas kinerja maka hal pertama yang harus dilakukan adalah mengukur capaian kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan untuk setiap pernyataan kinerja Sasaran Strategis yang selanjutnya disebut SS. Untuk setiap pernyataan kinerja SS tersebut kemudian dilakukan analisis capaian kinerja. Analisis capaian kinerja dapat dilakukan dengan cara:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja periode yang sama;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja periode ini dengan periode lalu;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan periode ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Adapun formulasi pengukuran kinerja untuk masing-masing IKU telah dipaparkan pada Bab terdahulu.

Pada tahun 2020, Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan menetapkan 12 (dua belas) SS dengan empat perspektif pendekatan *balance scorecard* (BSC), yakni *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Business Process Perspective*, dan *Learning and Growth Perspective*. Terdapat 3 (tiga) SS yang merupakan bagian dari *Stakeholder Perspective* dan terdiri dari 3 Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU, yaitu (1) Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (*Ease Doing Of Business*), (2) Persentase Investasi di Luar Jawa, (3) Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan. Pada *Customer Perspective* dan terdiri dari 5 (lima) IKU, yakni: (1) Jumlah Hari dalam Memulai Usaha; (2) Pertumbuhan Nilai Investasi bidang Jasa; dan (3) Persentase Realisasi Investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN); (4) Persentase Realisasi Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha; (5) Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB. Pada *Internal Business Process Perspective* terdapat 1 (satu) SS dengan satu IKU yaitu : Persentase Rancangan Kebijakan dan Pengendalian Bidang Investasi dan Pertambangan yang dijadikan sebagai Kebijakan Menteri. Terakhir, pada *Learning and*

*Growth Perspective* terdapat 3 (tiga) SS dan terdiri dari 1 (satu) IKU pada SS kesepuluh yaitu Persentase Pejabat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Memenuhi Standar Kompetensi Pegawai, 2 (dua) IKU pada SS kesebelas yaitu (1) Nilai PMRB Deputy; (2) Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy, dan 1 (satu) IKU pada SS kedubelas yaitu : Nilai IKPA Deputy.

**Tabel 3.1**  
**Capaian Kinerja Sasaran Strategis**  
**Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan**  
**Untuk Periode Triwulan III Tahun 2020**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN		REALISASI
			2020	Q3	Q3
<b>Stakeholder Perspective</b>					
<b>SS.1</b>	Terwujudnya iklim investasi yang Kondusif dalam rangka memperkuat Daya Saing Ekonomi Indonesia	1. Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia ( <i>Ease of Doing Business</i> )	60	-	-
<b>SS.2</b>	Meningkatnya sebaran Investasi yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Berkualitas dan Merata	2. Persentase Investasi di Luar Jawa	45,6%	-	-
<b>SS.3</b>	Meningkatnya Manfaat Ekonomi Sektor Pertambangan	3. Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan	27,1%	-	-
<b>Customer Perspective</b>					
<b>SS.4</b>	Terwujudnya Kemudahan Perizinan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Investasi	4. Jumlah Hari dalam memulai Usaha	8 Hari	-	-
<b>SS.5</b>	Meningkatnya Nilai Investasi Bidang Jasa yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Daerah	5. Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa	3%	-	-
<b>SS.6</b>	Meningkatnya Investasi Strategis yang Menggerakkan	6. Persentase Realisasi Investasi pada Proyek Strategis Nasional	85%	-	-

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN	REALISASI	
	Ekonomi Nasional	(PSN)			
SS.7	Meningkatnya Kontribusi Badan Usaha dalam Pembangunan Nasional	7. Persentase Realisasi Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	85%	-	-
SS.8	Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Ekspor Pertambangan	8. Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB	0,8%	-	-
<b>Internal Business Process Perspective</b>					
SS.9	Efektivitas Rumusan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan	9. Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang dijasikan sebagai Kebijakan Menteri	100%	-	-
<b>Learning And Growth Perspective</b>					
SS.10	Tersedianya SDM yang kompeten di Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	10. Persentase Pejabat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang memenuhi Standar Kompetensi jabatan	80%	-	-
SS.11	Terbentuknya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Baik	11. Nilai PMRB Deputy	60	-	-
		12. Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy	65	-	-
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	13. Nilai IKPA Deputy	70	-	-

Pada Tabel 3.1 ditampilkan target dan capaian kinerja masing-masing sasaran strategis (SS). Pada Level *Stakeholder Perspective* yaitu SS.1 IKU 1 terdapat target Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (*Ease Doing Of Business*) sebesar 60, pada SS.2 IKU 2 terdapat target

Persentase Investasi di Luar Jawa 45,6%, pada SS.3 IKU 3 terdapat target Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan. Pada Level *Customer Perspective* yaitu SS.4 IKU 4 terdapat target Jumlah Hari dalam Memulai Usaha selama 8 Hari; SS.5 IKU 5 terdapat target Pertumbuhan Nilai Investasi bidang Jasa sebesar 3%; SS.6 IKU 6 terdapat target Persentase Realisasi Investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN) sebesar 85%; SS.7 IKU 7 terdapat target Persentase Realisasi Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha sebesar 85%; SS.8 IKU 8 terdapat target Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB sebesar 0,8%. Pada level *Internal Business Process Perspective* yaitu SS.9 IKU 9 terdapat target Persentase Rancangan Kebijakan dan Pengendalian Bidang Investasi dan Pertambangan yang dijadikan sebagai Kebijakan Menteri sebesar 100%. Terakhir, pada level *Learning and Growth Perspective* yaitu SS.10 IKU 10 Persentase Pejabat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Memenuhi Standar Kompetensi Pegawai sebesar 80% , SS.11 IKU 11 terdapat target Nilai PMRB Deputi sebesar 60; SS.11 IKU 12 dengan target Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi sebesar 65, dan SS.12 IKU 12 dengan target Nilai IKPA Deputi sebesar 70.

Pada saat berakhirnya semester I ini dilaporkan bahwa belum ada sasaran strategis dan target IKU yang tercapai karena seluruhnya akan dilakukan pengukuran pada triwulan IV.

## **B. Analisis Capaian Kinerja**

Analisis capaian kinerja untuk setiap SS diuraikan menurut indikator kinerja dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Analisis ini menjelaskan lebih lanjut tentang pelaksanaan, permasalahan, dan solusi terhadap permasalahan yang ada. Gambaran hasil pengukuran kinerja SS dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk SS 1 s.d SS 3 pada *Stakeholder Perspective* sesuai perjanjian kinerja tidak ada target pada Triwulan III tahun 2020. Pada triwulan III ini tidak ada realisasi kinerja ketiga IKU;
2. Untuk SS 4 s.d SS 8 pada *Customer Perspective*, sesuai perjanjian kinerja tidak ada target pada triwulan III tahun 2020. Pada triwulan III ini tidak ada realisasi kinerja kelima IKU;
3. Untuk SS 9 pada *Internal Process Perspective*, sesuai perjanjian kinerja tidak ada target pada triwulan III tahun 2020. Pada triwulan III ini tidak ada realisasi pada IKU;
4. Untuk SS 10 s.d SS 12 pada *Learning and Growth Perspective*, sesuai perjanjian kinerja pada triwulan III tahun 2020. Pada triwulan III ini tidak ada realisasi pada IKU.

## **C. Capaian Indikator Kinerja Utama**

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan pertambangan merupakan unit kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 92 Tahun 2019 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Sehingga terkait dengan capaian indikator kinerja tidak dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Penilaian capaian indikator kinerja utama dilaksanakan berdasarkan penilaian kinerja pada tahun berjalan. Adapun capaian indikator kinerja utama triwulan III Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan pertambangan dapat diuraikan sebagai berikut:

IKU 1 : Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (*Ease of Doing Business*) sesuai dengan rilis dari Bank Dunia, peringkat Indonesia tetap pada angka 73, tetapi mencatatkan peningkatan skor pada indeks dari 67,96 menjadi 69,6.

IKU 2: Persentase Investasi di Luar Jawa, data nilai investasi di luar Jawa dihitung berdasarkan rilis dari BKPM RI, capaian dilakukan pengukuran pada TW IV.

IKU 3: Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan, dihitung berdasarkan rilis dari BPS, pada kuartal II TA 2020 kontribusi sektor pertambangan mengalami penurunan menjadi 6,28 persen dari sebelumnya 7,39 persen pada kuartal yang sama tahun 2019

IKU 4 – IKU 8: Pengukuran capaian indikator kinerja akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2020 sesuai dengan hasil dengan rilis Kementerian/Lembaga yang koordinasi oleh Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan.

IKU 9: demikian juga dengan indikator persentase rancangan kebijakan di bidang Investasi dan Pertambangan yang akan dijadikan kebijakan Menteri akan dilakukan pengukuran pada TW IV.

IKU 10 : pengukuran akan dilakukan dengan berkoordinasi dengan Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi karena indikator tersebut merupakan turunan langsung dan pengukuran dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi.

#### **D. Realisasi Anggaran**

Per 30 September 2020 baru terealisasi anggaran sebesar Rp 836.058.120,- atau sebesar 13,95 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp 5.994.017.000. Realisasi anggaran ini dipengaruhi oleh DIPA Revisi sesuai dengan nomenklatur baru yang baru disetujui pada bulan Agustus 2020, penundaan kegiatan-kegiatan disebabkan oleh kondisi Pandemi Covid19 dan perubahan kebijakan dari pimpinan.

Untuk unit kerja eselon II lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, persentase realisasi anggaran tertinggi dicapai oleh Asisten Deputi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha sebesar Rp 211.175.929 atau sebesar 26,40 persen. Sedangkan pencapaian realisasi anggaran terendah dicapai oleh Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi sebesar Rp 17.074.000 atau sebesar 1,8 persen. Sementara untuk rata-rata pencapaian realisasi anggaran baru menyentuh angka 13,23 persen. Pagu dan realisasi anggaran unit eselon II lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan per 30 September 2020 disajikan lengkap pada tabel 3.2 berikut.

**Tabel 3.2**  
**Pagu dan Realisasi Anggaran Unit Eselon II**  
**di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan**  
**Per 30 September 2020**

Unit Eselon II	Pagu	Realisasi	Sisa	Persentase
Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi	950.000.000	17.074.000	932.926.000	1,8%
Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa	750.000.000	96.319.911	653.680.089	12,84%
Asisten Deputi Investasi Strategis	800.000.000	147.348.000	652.652.000	18,42%
Asisten Deputi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha	800.000.000	211.175.929	588.824.071	26,40%
Asisten Deputi Pertambangan	700.000.000	18.050.000	681.950.000	2,58%
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	1.994.017.000	346.090.280	1.647.926.720	17,36%

Sumber: Bagian Keuangan, Biro Umum, Setmenko Bidang Kemaritiman, 2020

Rendahnya realisasi penyerapan anggaran ini jika dianalisa dapat disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang baru ditetapkan pada bulan Agustus 2020, dikarenakan perubahan sistem pengusulan revisi anggaran yang dipengaruhi oleh penanganan COVID19 yang menjadi fokus pemerintah. *Kedua*, kondisi pandemi COVID19 yang menyebabkan ditundanya beberapa agenda dan kegiatan yang telah direncanakan, terutama terkait dengan kunjungan lapangan dan koordinasi dengan stakeholder di daerah yang terkena dampak pandemi. *Ketiga*, jumlah SDM Aparatur di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang terbatas dan masih terus dilakukan pengisian terhadap jabatan-jabatan yang kosong.





## BAB IV

### PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan untuk Triwulan III tahun 2020, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Realisasi target indikator dalam sasaran strategis yang telah disusun dan ditetapkan belum dapat dilakukan pengukuran, hal ini disebabkan target ditetapkan pada Triwulan IV, sehingga pengukuran akan dilaksanakan pada Triwulan IV TA 2020.
2. Per 30 September 2020 baru terealisasi anggaran sebesar Rp836.058.120,- atau sebesar 13,95 persen dari total alokasi anggaran sebesar Rp 5.994.017.000,-. Untuk unit kerja eselon II lingkup Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan, realisasi anggaran tertinggi dicapai oleh Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sebesar Rp346.090.280,- atau sebesar 17,36 persen. Sedangkan pencapaian realisasi anggaran terendah dicapai oleh Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi sebesar Rp17.074.000,- atau sebesar 1,8 persen.
3. Rendahnya realisasi penyerapan anggaran ini jika dianalisa disebabkan oleh beberapa faktor. *Pertama*, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang baru ditetapkan pada bulan Agustus 2020, dikarenakan perubahan sistem pengusulan revisi anggaran yang dipengaruhi oleh penanganan COVID19 yang menjadi fokus pemerintah. *Kedua*, kondisi pandemi COVID19 yang menyebabkan ditundanya beberapa agenda dan kegiatan yang telah direncanakan, terutama terkait dengan kunjungan lapangan dan koordinasi dengan stakeholder di daerah yang terkena dampak pandemi. *Ketiga*, jumlah SDM Aparatur di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang terbatas dan masih terus dilakukan pengisian terhadap jabatan-jabatan yang kosong.

Tidak banyak yang dapat dianalisa terhadap capaian kinerja Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan pada Triwulan III ini, baik dengan membandingkan antara target dengan realisasi, capaian kinerja saat ini dengan periode yang lalu maupun penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan. Hal ini dikarenakan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan merupakan unit kerja yang baru dibentuk pada tahun 2020 sehingga tidak dapat dibandingkan capaian kinerja dan realisasi kegiatan maupun anggarannya dengan capaian tahun sebelumnya, dan juga keseluruhan Sasaran Strategis sedang dalam proses pencapaian melalui pelaksanaan komponen kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian yang semuanya akan dilaksanakan pengukuran pada triwulan IV tahun 2020. Selanjutnya untuk

mencapai target kinerja pada triwulan selanjutnya di tahun 2020, direkomendasikan untuk dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melaksanakan percepatan pelaksanaan kegiatan dengan fokus pada tahapan dan strategi pelaksanaan kegiatan yang telah disusun serta memprioritaskan kegiatan yang dijanjikan akan menghasilkan *outcome* atau *output* pada triwulan III yang akan mendekati *deadline* terutama dalam kondisi pandemi saat ini dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan;
2. Melakukan integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan antar Asisten Deputi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan sehingga kegiatan masing- masing Asisten Deputi dapat dilaksanakan secara serentak pada lokasi yang sama. Hal ini untuk menghindari jadwal yang bersamaan waktunya, menyederhanakan administrasi pertanggungjawaban keuangan, mensiasati kekurangan personil pelaksana kegiatan dan akhirnya diharapkan dapat meningkatkan serapan anggaran;
3. Fokus pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari target perjanjian kinerja. Kegiatan yang merupakan perintah dan arahan baru agar dapat dicarikan keterkaitannya dengan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RKA-K/L sehingga dapat diukur dan menjadi bagian dari pencapaian IKU;
4. Melakukan revisi anggaran dengan mengoptimalkan kegiatan-kegiatan yang menjadi fokus dalam pencapaian target dan indikator kinerja sehingga selaras dengan pengukuran kinerja selanjutnya yang akan dilakukan pada triwulan IV 2020;
5. Perbaiki pada proses administrasi keuangan minimal pada level Pejabat Pembuat Komitmen Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dengan penerbitan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) pengajuan pembayaran, tata cara revisi anggaran dan SOP lain yang dianggap perlu. Selain itu perlu didorong adanya SOP serupa dan panduan administrasi keuangan pada level Kuasa Pengguna Anggaran sehingga waktu dan persyaratan administrasi keuangan menjadi jelas dan terukur.

# LAMPIRAN

**LAMPIRAN I**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN**

---

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Septian Hario Seto  
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
2. Nama : Luhut B. Pandjaitan  
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,      September 2020

PIHAK KEDUA,  
  
Luhut B. Pandjaitan

PIHAK PERTAMA,  
  
Septian Hario Seto 

**LAMPIRAN I**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI**  
**INVESTASI DAN PERTAMBANGAN**

**TARGET KINERJA TAHUN 2020**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN
<b>Stakeholder Perspective</b>				
SS.1	Terwujudnya Iklim Investasi yang Kondusif dalam Rangka Memperkuat Daya Saing Ekonomi Indonesia	1	Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia ( <i>Ease of Doing Business</i> )	60
SS.2	Meningkatnya Sebaran Investasi yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional yang Berkualitas dan Merata	2	Persentase Investasi di Luar Jawa	45,6%
SS.3	Meningkatnya Manfaat Ekonomi Sektor Pertambangan	3	Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan	27,1%
<b>Customer Perspective</b>				
SS.4	Terwujudnya Kemudahan Perizinan yang Mampu Mendorong Pertumbuhan Investasi	4	Jumlah Hari dalam Memulai Usaha	8 Hari
SS.5	Meningkatnya Nilai Investasi Bidang Jasa yang Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Daerah	5	Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa	3%
SS.6	Meningkatnya Investasi Strategis yang Menggerakkan Ekonomi Nasional	6	Persentase Realisasi Investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN)	85%
SS.7	Meningkatnya Kontribusi Badan Usaha dalam Pembangunan Nasional	7	Persentase Realisasi Investasi Korjasama Pemerintah dan Badan Usaha	85%
SS.8	Meningkatnya Produksi dan Nilai Tambah Ekspor Pertambangan	8	Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan Terhadap PDB	0,8%
<b>Internal Business Perspective</b>				
SS.9	Efektifitas Rumusan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan	9	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang dijadikan sebagai Kebijakan Menteri	100%
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>				
SS.10	Tersedianya SDM yang kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	10	Persentase Pejabat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	80%

SS.11	Terbentuknya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Investasi dan Pertambangan yang Baik	11	Nilai PMPRB Deputy	60
		12	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy	65
SS.12	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	13	Nilai IKPA Deputy	70

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi	Rp 1.500.000.000,-
2	Koordinasi Investasi Bidang jasa	Rp 1.500.000.000,-
3	Koordinasi Investasi Strategis	Rp 1.500.000.000,-
4	Koordinasi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha	Rp 1.500.000.000,-
5	Koordinasi Pertambangan	Rp 1.500.000.000,-
6	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	Rp 2.500.000.000,-
<b>JUMLAH ANGGARAN</b>		<b>Rp 10.000.000.000,-</b>

Jakarta, September 2020

Menteri Koordinator  
Bidang Kemaritiman dan Investasi RI,

  
Luhut B. Pandjaitan

Deputy Bidang Koordinasi  
Investasi dan Pertambangan,

  
Septian Hario Seto



**LAMPIRAN II**  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI**  
**INVESTASI DAN PERTAMBANGAN**

**RINCIAN DATA KINERJA TAHUN 2020**  
**DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN**

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	JUDUL KINERJA/OUTPUT KINERJA	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
			I	II	III	IV
1.	Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia ( <i>Ease of Doing Business</i> )	1. Kemudahan Berusaha di Indonesia ( <i>Ease of Doing Business</i> )				✓
2.	Persentase Investasi di Luar Jawa	2. Investasi di Luar Jawa				✓
3.	Persentase Kontribusi PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan	3. PDB Sektor Pertambangan dan Industri Pengolahan				✓
4.	Jumlah Hari dalam Memulai Usaha	4. Kemudahan Berusaha di Indonesia ( <i>Ease of Doing Business</i> )				✓
5.	Pertumbuhan Nilai Investasi Bidang Jasa	5. Investasi Bidang Jasa				✓
6.	Persentase Realisasi Investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN)	6. Investasi Strategis				✓
7.	Persentase Realisasi Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	7. Investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha				✓
8.	Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB	8. Hilirisasi Pertambangan				✓
9.	Persentase Rancangan Kebijakan di Bidang Investasi dan Pertambangan yang Dijadikan sebagai Kebijakan Menteri	9. Rancangan Koordinasi Kebijakan Integrasi Sistem Perizinan				✓
		10. Rancangan Koordinasi Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi				✓
		11. Rancangan Koordinasi Kebijakan Penyelesaian Sengketa				✓
		12. Rancangan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Perencanaan dan Analisis Investasi Bidang Jasa				✓
		13. Rancangan Koordinasi Kebijakan Promosi Investasi dan Pengembangan Pelaku Usaha Jasa				✓
		14. Rancangan Koordinasi Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Investasi Bidang Jasa				✓
		15. Rancangan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Perencanaan dan Analisis Investasi Strategis				✓

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	JUDUL KINERJA/OUTPUT KINERJA	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
			I	II	III	IV
		16. Rancangan Koordinasi Kebijakan Promosi Investasi dan Fasilitasi Investasi Strategis				✓
		17. Rancangan Koordinasi Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Investasi Strategis				✓
		18. Rancangan Koordinasi Kebijakan Pengembangan Perencanaan Proyek Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha				✓
		19. Rancangan Koordinasi Kebijakan Implementasi Penjajakan Minat Pasar Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha				✓
		20. Rancangan Koordinasi Kebijakan Pemantauan dan Evaluasi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha				✓
		21. Rancangan Koordinasi Kebijakan Tata Kelola Pertambangan dan Peningkatan Nilai Tambah Mineral				✓
		22. Rancangan Koordinasi Kebijakan Tata Kelola Pertambangan dan Peningkatan Nilai Tambah Batu Bara				✓
		23. Rancangan Koordinasi Kebijakan Strategi Perencanaan dan Pengembangan Hilirisasi Mineral dan Batu Bara				✓
10.	Persentase Pejabat Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	24. SDM yang sesuai Kompetensinya				✓
11.	Nilai PMPRB Deputy	25. Nilai PMPRB Deputy				✓
12.	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy	26. Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputy				✓
13.	Nilai IKPA Deputy	27. Nilai IKPA Deputy				✓

Jakarta, September 2020

Deputi Bidang Koordinasi  
Investasi dan Pertambangan



Septian Mario Seto 





**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN**

---

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Latief Nurbana  
Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Septian Hario Seto  
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2020

PIHAK KEDUA,

**Septian Hario Seto**

PIHAK PERTAMA,

**Latief Nurbana**

**LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA 2020**  
**SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
				2020
<b>Stakeholder Perspective</b>				
SS.1	Tersedianya SDM yang kompeten di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	1	Persentase Pejabat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang sesuai Kompetensi	80%
SS.2	Terwujudnya Reformasi Birokrasi yang Efektif di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	2	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	65
		3	Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	60
SS.3	Terlaksananya Administrasi Keuangan yang Akuntabel di Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	4	Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	70
<b>Customer Perspective</b>				
SS.4	Terwujudnya tata kelola organisasi Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang baik	5	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan	100%
		6	Persentase ketaatan pelaporan lingkup deputi	100%
		7	Persentase dokumen Reformasi Birokrasi yang dapat disediakan tepat waktu	100%
<b>Internal Business Process</b>				
SS.5	Terlaksananya koordinasi program dan anggaran yang optimal	8	Jumlah dokumen penyelenggaraan rencana program dan anggaran Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	7 dokumen
SS.6	Terlaksananya layanan administrasi dan umum yang baik	9	Jumlah dokumen penyelenggaraan ketatausahaan dan laporan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	8 dokumen

KEGIATAN	ANGGARAN
Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	Rp. 2.500.000.000,-

Jakarta, 2020

Deputi Bidang Koordinasi  
Investasi dan Pertambangan



**Septian Hario Seto**

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi  
Investasi dan Pertambangan



**Latief Nurbana**

**LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA 2020**  
**SEKRETARIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI INVESTASI DAN PERTAMBANGAN**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA	PAGU (Rp)	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
				(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	I	II	III	IV
<b>Stakeholder Perspective</b>							
1	Persentase Pejabat Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan yang sesuai Kompetensi						80
2	Nilai Evaluasi Internal SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan						65
3	Nilai PMPRB Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan						60
4	Nilai IKPA Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan						70
<b>Customer Perspective</b>							
5	Persentase penyelesaian laporan yang tepat waktu						100
6	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan yang sesuai ketentuan						100
7	Persentase dokumen Reformasi Birokrasi yang dapat disediakan tepat waktu						100

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA	PAGU (Rp)	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
				(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	I	II	III	IV
<b>Internal Business Process</b>							
8	Jumlah dokumen penyelenggaraan rencana program dan anggaran serta pemantauan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	1. Dokumen Perencanaan Program	Rp. 1.250.000.000			1	1
		2. Dokumen Perencanaan Anggaran					2
		3. Dokumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja				1	1
		4. Dokumen Dukungan Kebijakan Strategis Deputi					1
9	Jumlah dokumen penyelenggaraan ketatausahaan dan laporan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	1. Dokumen Laporan Penyelenggaraan Ketatausahaan	Rp. 1.250.000.000				2
		2. Dokumen Laporan Bulanan dan Keuangan					4
		3. Dokumen Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi					1
		4. Dokumen Dukungan Kesekretariatan					1

Jakarta, 2020  
Sekretaris Deputi Bidang  
Koordinasi Investasi dan Pertambangan  
  
**Latief Nurbana**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 ASISTEN DEPUTI STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERCEPATAN INVESTASI

---

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Feri Akbar  
Jabatan : Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
2. Nama : Septian Hario Seto  
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2020

PIHAK KEDUA,  
  
Septian Hario Seto

PIHAK PERTAMA,  
  
Feri Akbar



**LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA 2020**  
**ASISTEN DEPUTI STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERCEPATAN INVESTASI**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
				2020
<b>Stakeholder Perspective</b>				
SS.1	Terwujudnya kemudahan investasi yang mampu menggerakkan ekonomi nasional	1	Jumlah hari dalam memulai usaha	8 Hari
<b>Customer Perspective</b>				
SS.2	Terwujudnya efisiensi dalam memulai usaha di Indonesia	2	Prosedur dalam memulai usaha	10 prosedur
SS.3	Integrasi perizinan daerah ke dalam OSS	3	Jumlah perizinan daerah yang terintegrasi ke OSS	32 provinsi
SS.4	Penyederhanaan prosedur pengadaan lahan	4	Jumlah hari dalam pengadaan lahan	14 hari
<b>Internal Business Process</b>				
SS.5	Efektifitas Rumusan Kebijakan di bidang strategi dan kebijakan percepatan investasi	5	Persentase rumusan kebijakan di bidang strategi dan kebijakan percepatan investasi yang dijadikan sebagai rancangan kebijakan	100%

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
Koordinasi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi	Rp. 1.500.000.000

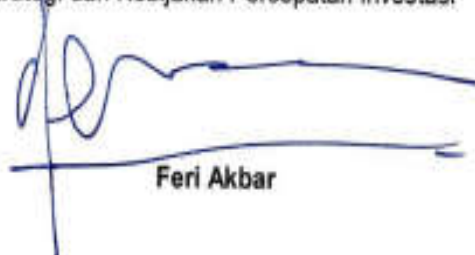
Jakarta, 2020

Deputi Bidang  
Koordinasi Investasi dan Pertambangan



**Septian Hario Seto**

Asisten Deputi  
Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi



**Feri Akbar**

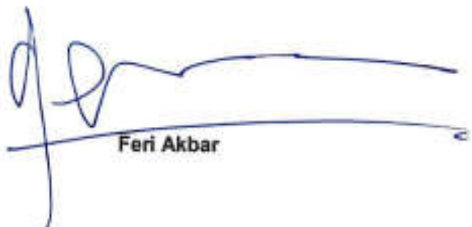
**LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA 2020**  
**ASISTEN DEPUTI STRATEGI DAN KEBIJAKAN PERCEPATAN INVESTASI**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA	PAGU (Rp)	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
				(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	I	II	III	IV
<i>Stakeholder Perspective</i>							
1	Jumlah hari dalam memulai usaha						8
<i>Customer Perspective</i>							
2	Prosedur dalam memulai usaha						10
3	Jumlah perizinan daerah yang terintegrasi ke OSS						32
4	Jumlah hari dalam pengadaan lahan						14
<i>Internal Business Process</i>							
5	Persentase rumusan kebijakan di bidang strategi dan kebijakan percepatan investasi yang dijadikan sebagai rancangan kebijakan	1. Rumusan Kebijakan Integrasi Sistem Perizinan	Rp. 500.000.000				100%
		2. Rumusan Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi	Rp. 500.000.000				100%

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA	PAGU (Rp)	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
				(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	I	II	III	IV
		3. Rumusan Kebijakan Penyelesaian Sengketa	Rp. 500.000.000				100%

Jakarta, 2020

Asisten Deputi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi

  
**Feri Akbar**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 ASISTEN DEPUTI INVESTASI BIDANG JASA

---

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Farah Heliantina**  
Jabatan : Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : **Septian Hario Seto**  
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2020

PIHAK KEDUA,

**Septian Hario Seto**

PIHAK PERTAMA,

**Farah Heliantina**

**LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA 2020  
ASISTEN DEPUTI INVESTASI BIDANG JASA**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
				2020
<i>Stakeholder Perspective</i>				
SS.1	Meningkatnya nilai investasi bidang jasa yang mendukung pertumbuhan dan manfaat ekonomi nasional	1	Pertumbuhan nilai investasi bidang jasa	3%
<i>Customer Perspective</i>				
SS.2	Meningkatnya nilai investasi sektor jasa pariwisata	2	Pertumbuhan nilai investasi sektor jasa pariwisata	2%
SS.3	Meningkatnya nilai investasi sektor jasa perdagangan	3	Pertumbuhan nilai investasi sektor jasa perdagangan	4%
SS.4	Meningkatnya nilai investasi sektor jasa perdagangan e-commerce	4	Pertumbuhan nilai investasi sektor jasa perdagangan e-commerce	2%
<i>Internal Business Process</i>				
SS.5	Efektifitas Rumusan Kebijakan di bidang investasi bidang jasa	5	Persentase rumusan kebijakan di bidang investasi bidang jasa yang dijadikan sebagai rancangan kebijakan	100%

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
Koordinasi Investasi Bidang Jasa	Rp. 1.500.000.000

Jakarta, 2020

Deputi Bidang  
Koordinasi Investasi dan Pertambangan



**Septian Hario Seto**

Asisten Deputi  
Investasi Bidang Jasa



**Farah Heliantina**



**LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA 2020  
ASISTEN DEPUTI INVESTASI BIDANG JASA**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA	PAGU (Rp)	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
				(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	I	II	III	IV
<b>Stakeholder Perspective</b>							
1	Pertumbuhan nilai investasi bidang jasa						3%
<b>Customer Perspective</b>							
2	Pertumbuhan nilai investasi sektor jasa pariwisata						2%
3	Pertumbuhan nilai investasi sektor jasa perdagangan						4%
4	Pertumbuhan nilai investasi sektor jasa perdagangan e-commerce						2%
<b>Internal Business Process</b>							
5	Jumlah rumusan kebijakan di bidang jasa yang dihasilkan	1. Rumusan koordinasi kebijakan pengembangan perencanaan dan analisis investasi bidang jasa	Rp. 500.000.000				100%
		2. Rumusan koordinasi kebijakan promosi investasi dan pengembangan pelaku usaha jasa	Rp. 500.000.000				100%

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA	PAGU (Rp)	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
				(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	I	II	III	IV
		3. Rumusan koordinasi kebijakan pemantauan dan evaluasi investasi bidang jasa	Rp. 500.000.000				100%

Jakarta, 2020

Asisten Deputi Investasi Bidang Jasa



**Farah Heliantina**



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 ASISTEN DEPUTI INVESTASI STRATEGIS

---

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Bimo Wijayanto  
Jabatan : Asisten Deputi Investasi Strategis  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Septian Hario Seto  
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2020

PIHAK KEDUA,

Septian Hario Seto

PIHAK PERTAMA,

Bimo Wijayanto

**LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA 2020  
ASISTEN DEPUTI INVESTASI STRATEGIS**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
				2020
<b>Stakeholder Perspective</b>				
SS.1	Terwujudnya investasi strategis yang mendukung pertumbuhan dan manfaat ekonomi nasional	1	Persentase realisasi investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN)	85%
<b>Customer Perspective</b>				
SS.2	Terwujudnya kontribusi sektor infrastruktur pada investasi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	2	Persentase realisasi investasi pada Sektor Infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN)	70%
SS.3	Terwujudnya kontribusi sektor Kawasan pada investasi strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi	3	Persentase realisasi investasi pada Sektor Kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN)	60%
SS.4	Terselesaikannya proyek – proyek strategis di luar PSN yang ditugaskan oleh Presiden kepada Menteri Koordinator.	4	Persentase penyelesaian proyek – proyek strategis di luar PSN yang terhambat yang ditugaskan oleh Presiden kepada Menteri Koordinator	80%
<b>Internal Business Process</b>				
SS.5	Efektifitas Rumusan Kebijakan di bidang investasi strategis	5	Persentase rumusan kebijakan di bidang investasi strategis yang dijadikan sebagai rancangan kebijakan	100%

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
Koordinasi Investasi Strategis	Rp. 1.500.000.000

Jakarta, 2020

Deputi Bidang  
Koordinasi Investasi dan Pertambangan

  
**Septian Hario Seto**

Asisten Deputi  
Investasi Strategis

  
**Bimo Wijayanto**

LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA 2020  
ASISTEN DEPUTI INVESTASI STRATEGIS

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA	PAGU (Rp)	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
				(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	I	II	III	IV
<b>Stakeholder Perspective</b>							
1	Persentase realisasi investasi pada Proyek Strategis Nasional (PSN)						85%
<b>Customer Perspective</b>							
2	Persentase realisasi investasi pada Sektor Infrastruktur Proyek Strategis Nasional (PSN)						70%
3	Persentase realisasi investasi pada Sektor Kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN)						60%
4	Persentase penyelesaian proyek – proyek strategis di luar PSN yang terhambat yang ditugaskan oleh Presiden kepada Menteri Koordinator						80%

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA	PAGU (Rp)	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
				(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	I	II	III	IV
<b>Internal Business Process</b>							
5	Persentase rumusan kebijakan di bidang investasi strategis yang dijadikan sebagai rancangan kebijakan	1. Rumusan koordinasi kebijakan pengembangan perencanaan dan analisis investasi strategis	Rp. 500.000.000				100%
		2. Rumusan koordinasi kebijakan promosi investasi dan fasilitasi investasi strategis	Rp. 500.000.000				100%
		3. Rumusan koordinasi kebijakan pemantauan dan evaluasi investasi strategis	Rp. 500.000.000				100%

Jakarta, 2020  
Asisten Deputi Investasi Strategis



**Bimo Wijayanto**



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**ASISTEN DEPUTI KERJASAMA INVESTASI PEMERINTAH DAN BADAN USAHA**

---

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Hari Kusmardianto  
Jabatan : Asisten Deputi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
  
2. Nama : Septian Hario Seto  
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2020

PIHAK KEDUA,

**Septian Hario Seto**

PIHAK PERTAMA,

**Hari Kusmardianto**



**LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA 2020**  
**ASISTEN DEPUTI KERJASAMA INVESTASI PEMERINTAH DAN BADAN USAHA**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
				2020
<b>Stakeholder Perspective</b>				
SS.1	Meningkatnya kontribusi badan usaha dalam pembangunan nasional	1	Persentase realisasi investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha	85%
<b>Customer Perspective</b>				
SS.2	Meningkatnya potensi kerjasama investasi pemerintah dan badan usaha	2	Persentase realisasi investasi kerjasama pemerintah dan badan usaha yang ditawarkan	90%
SS.3	Implementasi kerjasama investasi pemerintah dan badan usaha yang efektif	3	Persentase realisasi investasi kerjasama pemerintah dan badan usaha yang telah pemenuhan pembiayaan	90%
<b>Internal Business Process</b>				
SS.4	Efektifitas Rumusan Kebijakan di bidang investasi pemerintah dan badan usaha	4	Persentase rumusan kebijakan di bidang investasi pemerintah dan badan usaha yang dijadikan sebagai rancangan kebijakan	100%

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
Koordinasi Kerjasama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha	Rp. 1.500.000.000

Jakarta, 2020

Deputi Bidang  
Koordinasi Investasi dan Pertambangan



**Septian Hario Seto**

Asisten Deputi  
Kerjasama Investasi  
Pemerintah dan Badan Usaha



**Hari Kusmardianto**

**LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA 2020**  
**ASISTEN DEPUTI KERJASAMA INVESTASI PEMERINTAH DAN BADAN USAHA**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA	PAGU (Rp)	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
				(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	I	II	III	IV
<b>Stakeholder Perspective</b>							
1	Persentase realisasi investasi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha						85%
<b>Customer Perspective</b>							
2	Persentase realisasi investasi kerjasama pemerintah dan badan usaha yang ditawarkan						90%
3	Persentase realisasi investasi kerjasama pemerintah dan badan usaha yang telah pemenuhan pembiayaan						90%
<b>Internal Business Process</b>							
4	Persentase rumusan kebijakan di bidang investasi pemerintah dan badan usaha yang dijadikan sebagai rancangan kebijakan	1. Rumusan koordinasi kebijakan pengembangan perencanaan proyek kerjasama investasi pemerintah dan badan usaha	Rp. 500.000.000				100%
		2. Rumusan koordinasi kebijakan implementasi peninjauan minat pasar kerjasama investasi pemerintah dan badan usaha	Rp. 500.000.000				100%

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA	PAGU (Rp)	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
				(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	I	II	III	IV
		3. Rumusan koordinasi kebijakan pemantauan dan evaluasi kerjasama investasi pemerintah dan badan usaha	Rp. 500.000.000				100%

Jakarta, 2020

Asisten Deputi  
Kerjasama Investasi  
Pemerintah dan Badan Usaha



Hari Kusmardianto



## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020 ASISTEN DEPUTI PERTAMBANGAN

---

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Tubagus Nugraha  
Jabatan : Asisten Deputi Pertambangan  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Septian Hario Seto  
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan  
Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

**PIHAK KEDUA** akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2020

PIHAK KEDUA,

Septian Hario Seto

PIHAK PERTAMA,

Tubagus Nugraha



**LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA 2020  
ASISTEN DEPUTI PERTAMBANGAN**

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA		TARGET
				2020
<i>Stakeholder Perspective</i>				
SS.1	Meningkatnya produksi dan nilai tambah ekspor pertambangan	1	Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB	0,8%
<i>Customer Perspective</i>				
SS.2	Meningkatnya industri hilirisasi mineral dan batubara	2	Persentase pembangunan pengolahan dan pemurnian mineral ( <i>smelter</i> )	75%
SS.3	Meningkatnya pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah mineral dalam negeri	3	Indeks pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah dalam negeri	75,04
SS.4	Terpenuhinya target produksi batubara untuk kepentingan domestik (DMO)	4	Jumlah produksi batubara untuk kepentingan domestik (DMO)	155 jt ton
<i>Internal Business Process</i>				
SS.5	Efektifitas Rumusan Kebijakan di bidang pertambangan	5	Persentase rumusan kebijakan di bidang pertambangan yang dijadikan sebagai rancangan kebijakan	100%

KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
Koordinasi Pertambangan	Rp. 1.500.000.000

Jakarta, 2020

Deputi Bidang  
Koordinasi Investasi dan Pertambangan



**Septian Hario Seto**

Asisten Deputi Pertambangan



**Tubagus Nugraha**

**LAMPIRAN II PERJANJIAN KINERJA 2020  
ASISTEN DEPUTI PERTAMBANGAN**

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA	PAGU (Rp)	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
				(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	I	II	III	IV
<b>Stakeholder Perspective</b>							
1	Peningkatan Kontribusi Hilirisasi Pertambangan terhadap PDB						0,8%
<b>Customer Perspective</b>							
2	Persentase pembangunan pengolahan dan pemurnian mineral (smelter)						75%
3	Indeks pasokan mineral untuk peningkatan nilai tambah dalam negeri						75,04
4	Jumlah produksi batubara untuk kepentingan domestik (DMO)						155 jt ton
<b>Internal Business Process</b>							
5	Persentase rumusan kebijakan di bidang pertambangan yang dijadikan sebagai rancangan kebijakan	1. Rumusan pengendalian kebijakan tatakelola pertambangan dan peningkatan nilai tambah mineral	Rp. 500.000.000				100%
		2. Rumusan koordinasi kebijakan tatakelola pertambangan dan peningkatan nilai tambah batu bara	Rp. 500.000.000				100%

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	JUDUL KINERJA	PAGU (Rp)	JADWAL KELUARAN KINERJA (TW)			
				(5)			
(1)	(2)	(3)	(4)	I	II	III	IV
		3. Rumusan koordinasi kebijakan strategi perencanaan dan pengembangan hilirisasi mineral dan batu bara	Rp. 500.000.000				100%

Jakarta, 2020  
Asisten Deputi Pertambangan

  
Tubagus Nugraha

## LAMPIRAN II

### REALISASI KOMPONEN KEGIATAN PERIODE SEMESTER I TAHUN 2020

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
1	Penyelenggaraan Pelayanan Kesekretariatan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	<b>Penelitian Usulan Revisi Anggaran (DIPA) berdasarkan SOTK baru Kementerian Koordinator Bidang Kemartiman dan Investasi</b> : Kegiatan penelitian usulan Revisi Anggaran (DIPA) SOTK baru dilaksanakan untuk mempercepat proses perubahan dan alokasi anggaran setiap unit kerja , yang selanjutnya akan dilakukan penelahaan dan penelitian sesuai deng Renja masing-masing unit kerja dan juga sebagai bahan pelaksanaan reuiu oleh Inspekorat	9 Juli 2020	10 Juli 2020	Swiss Bell Hotel Bogor	-	-
		<b>Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2021</b> : kegiatan bertujuan untuk menyusun Usulan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi TA 2021 berdasarkan Pagu Indikatif yang telah di tetapkan	20 Juli 2020	22 Juli 2020	101 Hotel Bogor		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		<p><b>Menghadiri Reviu RKA-K/L Kemenko Maritim dan Investasi Tahun Anggaran 2021:</b> Kegiatan ini bertujuan untuk mereviu kembali usulan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing Deputi yang telah disusun berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.</p>	22 Juli 2020	24 Juli 2020	101 Hotel Bogor		
		<p><b>Sosialisasi Hibah Luar Negeri di lingkungan Kemenko Marves:</b> kegiatan dilaksanakan sebagai salah satu langkah penyampaian informasi terkait dengan proses, prosedur, petunjuk pelaksanaan Hibah Luar Negeri kepada Kementerian/Lembaga atau Instansi. Kegiatan ini menghadirkan Narasumber dari Kementerian Luar Negeri, Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Keuangan</p>	10 Juli 2020	12 Juli 2020	Grand Zury Hotel, BSD		
		<p><b>Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Prioritas dan Quick Wins Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Tahun 2020:</b> kegiatan dilaksanakan dalam rangka memonitor pencapaian Program Prioritas dan Quick Wins yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja</p>	22 Oktober 2020	24 Oktober 2020	El Royale Hotel, Bandung		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		<b>Rapat Pembahasan Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Kegiatan EITI TA 2021:</b> kegiatan bertujuan untuk melengkapi data dukung yang diperlukan untuk pengusulan alokasi tambahan anggaran untuk kegiatan EITI TA 2021	25 Juni 2020	25 Juni 2020	RR Lantai 19, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan		
		<b>Rapat Persiapan Dokumen untuk penandatanganan Perjanjian Kinerja Eselon II, III dan IV di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020:</b> kegiatan bertujuan untuk membahas persiapan dokumen Perjanjian Kinerja Pejabat Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Staf di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	30 September 2020	30 September 2020	RR Lantai 19, Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan		
		<b>Penyusunan Manual Indikator dan Pemetaan Kegiatan pada Sistem Informasi Kinerja Maritim (SIK-M) di Lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan:</b> kegiatan dilaksanakan untuk menyusun dokumen kinerja yang akan diinput pada aplikasi SIK-M yang salah satunya yaitu manual IKU sebagai dokuemn untuk melakukan pengukuran kinerja	5 Oktober 2020	5 Oktober 2020	RR Lantai 4, Kemenko Marves		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		<b>Rapat Finalisasi Penyusunan Renstra Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan:</b> kegiatan ini dilaksanakan untuk membahas Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Tahun 2020-2024	1 Juli 2020	1 Juli 2020	RR Lantai 19, Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan		
		<b>Rapat Pembahasan Program Kerja Asisten Deputy dan Sekretaris Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan:</b> pembahasan program kerja dilaksanakan sebagai upaya untuk identifikasi dan pemetaan program kerja masing-masing unit kerja yang akan dijadikan acuan pelaksanaan kegiatan	13 Juli 2020	13 Juli 2020	RR Lantai 19, Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan		
		<b>Pembahasan Peta Strategis Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan:</b> Kegiatan dilaksanakan dalam rangka pembahasan peta strategis Deputy yang akan dijadikan dokumen kinerja	11 Agustus 2020	11 Agustus 2020	RR Lantai 19, Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		<b>Rapat Pembahasan Major Project di Lingkungan Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan:</b> merupakan tindak lanjut dari rapat pembahasan gugus tugas Delivery Assurance Unit dimana Kementerian Koordinator menjadi verifikator dalam penilaian capaian major project dalam aplikasi Sismonev 2.0 KSP	13 Agustus 2020	13 Agustus 2020	RR Lantai 19, Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan		
		<b>Rapat Penyusunan Videografis Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan:</b> sebagai salah satu dokumentasi capaian pelaksanaan kegiatan dan project yang di koordinasikan oleh Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan	12 Agustus 2020	12 Agustus 2020	RR Lantai 21, Kemenko Marves		
		<b>Bimbingan Teknis Pengenalan Infografis:</b> dilaksanakan sebagai upaya peningkatan kapasitas SDM Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan terutama terkait pembuatan materi presentasi berdasarkan infografis	25 Agustus 2020	25 Agustus 2020	RR Lantai 19, Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan		



NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		<p><b>Rapat Koordinasi Pembahasan Potensi dan Permasalahan Investasi pada Sektor Jasa Pariwisata di Kabupaten Humbang Hasundutan:</b> merupakan salah satu upaya untuk mengenali potensi dan permasalahan terkait sector jasa pariwisata terutama untuk wilayah sekitar Danau Toba yang menjadi salah satu destinasi wisata baru</p>	26 Agustus 2020	28 Agustus 2020	Kantor Pemkab Humbang Hasundutan		
		<p><b>Percepatan Reformasi Birokrasi dan Penyempurnaan SAKIP (Benchmark pelaksanaan Implementasi SAKIP) di Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi:</b> kegiatan dilaksanakan untuk melakukan penyempurnaan SAKIP Kemenko Marves dengan studi banding/benchmark dengan Pemkab Banyuwangi yang mendapatkan Nilai A dalam penilaian SAKIP Men PAN RB</p>	8 Oktober 2020	10 Oktober 2020	Kantor Pemkab Banyuwangi		
2	Koordinasi Strategi dan Kebijakan Percepatan Investasi	<p><b>Kunjungan Inventarisasi Masalah Hambatan Investasi dan Percepatan Proyek Pengembangan Pelabuhan Batang:</b> kegiatan dilaksanakan sebagai upaya dalam inventarisir masalah dan hambatan investasi dan percepatan proyek pengembangan pelabuhan Batang</p>	13 September 2020	16 September 2020	Pelabuhan Batang, Jawa Tengah	-	

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		<b>Kunjungan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Provinsi Sumut:</b> kegiatan dilaksanakan sebagai langkah dalam percepatan dan pengawasan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) serta penyelesaian masalah di ruas tol yang akan dibangun	22 Sept 2020	26 Sept 2020	Proyek Jalan Tol Trans Sumatera		
		<b>Kunjungan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Provinsi Sumsel:</b> kegiatan dilaksanakan sebagai upaya dalam inventarisir dan penyelesaian masalah di proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Kayu Agung-Palembang-Betung dan Simpang Indralaya-Muaraenim	29 Sept 2020	2 Oktober 2020	Proyek Jalan Tol Trans Sumatera		
		<b>Kunjungan Dalam Rangka Percepatan Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Provinsi Sumbar:</b> kegiatan dilaksanakan sebagai upaya dalam inventarisir dan penyelesaian masalah di proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) ruas Padang-Sicincin	6 Okt 2020	9 Okt 2020	Proyek Jalan Tol Trans Sumatera		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		<b>Kunjungan Kerja Kepala BNPB_Satgas Covid-19 Di Gorontalo, Manado, Biak Dan Denpasar:</b> pendampingan kunjungan Kepala BNPB/Satgas Covid 19 di 4 lokasi	6 Okt 2020	9 Okt 2020	Gorontalo, Manado, Biak, dan Denpasar		
		<b>Rakor Pengonsepan Pasal Pembekuan Fasilitas Pengurangan PPh Badan Dalam Revisi PMK Nomor 150 Tahun 2018:</b> dilaksanakan dalam rangka pengonsepan pasal pembekuan fasilitas pengurangan PPh Badan dalam Revisi PMK Nomor 150 Tahun 2018	6 Okt 2020	7 Okt 2020	101 Hotel Bogor		
		<b>Aktualisasi dan Sinkronisasi Data Lintas Kementerian Dari Hasil Rekapitulasi Kuesioner Smelter dan Surveyor:</b> pembahasan data dan informasi yang dihimpun oleh Tim Kerja Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Nikel (HPM)	8 Okt 2020	10 Okt 2020	Four Points Bandung		
3	Koordinasi Investasi Bidang Jasa	<b>Kunjungan Lapangan ke Pelabuhan Belawan, Pelabuhan Kuala Tanjung dan Sharing Session Percepatan Pengembangan Pelabuhan Kuala Tanjung:</b> kegiatan dilaksanakan dalam upaya pembahasan permasalahan pengembangan pelabuhan Belawan dan Kuala Tanjung	6 Okt 2020	11 Okt 2020	Pelabuhan Belawan & Kuala Tanjung	-	-

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		<b>Asistensi pada Ekspor Produk Jadi Timah untuk Tin Chemical dan Tin Solder:</b> kegiatan dilaksanakan dalam rangka pembahasan kendala dan permasalahan dalam kegiatan produksi dan ekspor yang dilakukan oleh PT.Timah Industri	9 Sept 2020	12 Sept 2020	PT. Timah Industri, Cilegon		
		<b>Rapat Koordinasi Pembahasan Potensi dan Permasalahan Investasi pada Sektor Jasa Pariwisata di Kabupaten Humbang Hasundutan:</b> kegiatan dilaksanakan untuk membahas potensi permasalahan investasi sektor jasa pariwisata di Kab. Humbang Hasundutan	26 Agustus 2020	29 Agustus 2020	Pemkab Humbang Hasundutan		
		<b>Investment Dialogue antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kerajaan Belanda:</b> kegiatan dilaksanakan dalam rangka pembahasan terkait General Business Climate dan Update on Omnibus Bill	1 Okt 2010	1 Okt 2020	Video Conference		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
4	Koordinasi Investasi Strategis	<b>Koordinasi Rekomendasi KLHK terkait penetapan baterai lithium bekas yang bukan merupakan limbah B3:</b> kegiatan dilaksanakan dengan focus permasalahan yaitu tentang pengaturan pemanfaatan limbah baterai lithium dan terkait deng impor bahan baku produk	18 Juni 2020	29 Juni 2020	Video Conference	-	-
		<b>Rapat Pembahasan HS Code Baterai Lithium Bekas sebagai Bahan Baku Industri:</b> kegiatan dilaksanakan untuk membahas dan mengidentifikasi HS Code bagi baterai lithium bekas yang akan diimpor sebagai bahan baku industry sebagai persiapan untuk Finalisasi Revisi Permendag tentang Impor Baterai Lithium	10 Sept 2020	10 Sept 2020	Video Conference		
		<b>Rapat Pembahasan HS Code Baterai Lithium Bekas sebagai Bahan Baku Industri:</b> kegiatan dilaksanakan untuk membahas dan mengidentifikasi HS Code bagi baterai lithium bekas yang akan diimpor sebagai bahan baku industry sebagai persiapan untuk Finalisasi Revisi Permendag tentang Impor Baterai Lithium	15 Sept 2020	15 Sept 2020	Video Conference		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		<b>Rapat Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang ketentuan Impor Baterai Lithium Bekas sebagai Bahan Baku Industri</b>	7 Sept 2020	7 Sept 2020	Video Conference		
		<b>Rapat Koordinasi Percepatan Investasi Pengolahan Limbah Baterai Lithium di Indonesia</b>	14 Juli 2020	14 Juli 2020	Video Conference		
		<b>Bimbingan Teknis Penyusunan Pohon Kinerja pada Asisten Deputi Investasi Strategis</b>	31 Agustus 2020	2 Sept 2020	Grand Zury Hotel, BSD		
		<b>Focus Group Discussion Pengembangan Industri Farmasi di Indonesia</b>	18 Juni 2020	2 Juli 2020	Video Conference		
		<b>Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Usulan Pengembangan Industri Farmasi Khususnya Bahan Baku Obat</b>	12 Agustus 2020	12 Agustus 2020	Video Conference		
		<b>Rapat Koordinasi Pembahasan Strategi Pengadaan OMAI ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional</b>	23 Sept 2020	23 Sept 2020	Video Conference		
		<b>Rapat Koordinasi Penerapan TKDN Sektor Farmasi</b>	29 Sept 2020	29 Sept 2020	Video Conference		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		<b>Rapat Pembahasan Program Prioritas, Strategi Implementasi dan Rencana Aksi Lingkup Asisten Deputi Investasi Strategis</b>	9 Sept 2020	13 Sept 2020	East Park Hotel, DIY		
		<b>Rapat Koordinasi Usulan Penurunan Tarif PPh Final Jasa Konstruksi dan Penyesuaian WAPU BUMN Konstruksi</b>	7 Sept 2020	7 Sept 2020	Video Conference		
		<b>Rapat Koordinasi Tingkat Menteri Pembahasan Usulan Penurunan Tarif PPh Final Jasa Konstruksi dan Penghapusan WAPU BUMN Konstruksi</b>	17 Sept 2020	17 Sept 2010	Video Conference		
		<b>Peninjauan Lapangan Status Proyek Investasi Pabrik Panel Surya LEN</b>	30 Sept 2020	1 Okt 2020	PT. LEN Industri, Bandung		
5	Koordinasi Kerja Sama Investasi Pemerintah dan Badan Usaha	<b>Kunjungan Kerja Mendampingi Plt. Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan ke Depo LRT Bekasi Jawa Barat:</b> kegiatan dilaksanakan untuk memantau proses pengerjaan LRT	28 Mei 2020	28 Mei 2020	Depo LRT, Bekasi	-	
		<b>Site Visit di Stasiun LRT Harjamukti Jabodebek:</b> kegiatan dilaksanakan untuk melihat sejauh mana pelaksanaan proyek LRT berlangsung	16 Juni 2020	16 Sept 2020	Stasiun LRT Harjamukti		
		<b>Rapat Koordinasi Tindaklanjut Penyelesaian Rencana Pelaksanaan KPBU Pembangunan TOD Poris</b>	7 Juli 2020	7 Juli 2020	Video Conference		



NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		<b>Plawad Kota Tangerang:</b> merupakan langkah untuk membahas permasalahan dan percepatan penyelesaian pembangunan TOD					
		<b>Peninjauan Lapangan Depo LRT Jabodebek Jatimulya – Bekasi Timur</b>	9 Juli 2020	9 Juli 2020	Depo LRT Jatimulya, Bekasi		
		<b>Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Rakor Menko tentang Realokasi Anggaran Pembangunan Jalan Tol di Mandarin Oriental</b>	27 Agust 2020	27 Agust 2020	Mandarin Oriental Hotel, Jakarta		
		<b>Konsultasi Publik Pembangunan Bandara Udara Kediri di Kediri Jawa di Jawa Timur</b>	18 Agust 2020	20 Agust 2020	Bandara Kediri, Jawa Timur		
		<b>Focus Group Discussion (FGD) ke-2 (dua) Pekerjaan Studi Kelayakan (Feasibility Study) dan Desain Teknik Dasar (Basic Engineering Design) Moda Transportasi Kereta Perkotaan Bandara I Gusti Ngurah Rai - Sanur</b>	7 Sept 2020	9 Sept 2020	Quest San Hotel Denpasar, Bali		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		<b>Rapat Koordinasi Badan Pengatur Jalan Tol dan ATI di Labuhan Bajo, Nusa Tenggara Timur</b>	9 Sept 2020	12 Sept 2020	Labuan Bajo, NTT		
		<b>Peninjauan Lapangan Jalan Tol Jawa Timur di Gresik</b>	13 Sept 2020	15 Sept 2020	Proyek Jalan Tol Trans Jawa		
		<b>Bimbingan Teknis (Bimtek) Penggunaan Aplikasi Sismonev 2.0 Kemenko Marves Tahun 2020 di BSD City</b>	24 Sept 2020	26 Sept 2020	Grand Zury Hotel, BSD		
		<b>Rapat Koordinasi Teknis dan Kunjungan Lapangan Kelompok Kerja Peningkatan Kerja Peningkatan Produksi Udang Nasional di Aceh Timur</b>	14 Juli 2020	16 Juli 2020	Pemkab Aceh Timur, Aceh		
		<b>Pendampingan Kunjungan Lapangan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi di Bali</b>	16 Agust 2020	22 Agust 2020	Denpasar, Bali		
		<b>Rapat Koordinasi Badan Pengatur Jalan Tol dan ATI di Labuhan Bajo</b>	9 Sept 2020	12 Sept 2020	Labuan Bajo, NTT		
		<b>Kunjungan Lapangan ke Proyek Jalan Tol Trans Sumatera di Pekan Baru, Dumai</b>	13 Sept 2020	16 Sept 2020	Proyek Jalan Tol Trans Sumatera		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		<b>Peninjauan Lapangan Jalan Tol Cisumdawu di Sumedang dan Bandung</b>	15 Sept 2020	17 Sept 2020	Proyek Tol Cisumdawu		
		<b>Kunjungan Lapangan ke Proyek Jalan Tol Trans Sumatera di Medan, Sumatera Utara</b>	22 Sept 2020	26 Sept 2020	Proyek Jalan Tol Trans Sumatera		
		<b>Kunjungan Lapangan ke Proyek Tol Cisumdawu di Bandung dan Sumedang</b>	28 Sept 2020	30 Sept 2020	Proyek Jalan Tol Cisumdawu		
6	Koordinasi Pertambangan	<b>Rapat Koordinasi Klarifikasi Penerapan HPM oleh PT Virtue Dragon dan PT Obsidian Stainless Steel</b>	18 Agust 2020	18 Agust 2020	Video Conference	-	-
		<b>Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penegakan Hukum Peraturan Menteri ESDM Nomor 11/2020</b>	23 Sept 2020	23 Sept 2020	Video Conference		
		<b>Rapat Koordinasi Sinkronisasi PMK No. 150/2018 Terhadap Klausul Kewajiban Kepatuhan Dalam Undang-Undang Nomor 25/2007 Tentang Penanaman Modal</b>	28 Sept 2020	28 Sept 2020	Video Conference		

NO.	KEGIATAN	CAPAIAN	TANGGAL	TANGGAL AKHIR	TEMPAT	KENDALA	TINDAK LANJUT
		<b>Rapat Koordinasi Klarifikasi Kapasitas Perusahaan Surveyor Untuk Mengakomodasi Kewajiban Verifikasi Perusahaan Tambang dan Perusahaan Smelter</b>	28 Sept 2020	28 Sept 2020	Video Conference		
		<b>Rapat Koordinasi Pengalihan Pelaksanaan Verifikasi Perusahaan Smelter Kepada Perusahaan Surveyor yang Terdaftar di Kementerian ESDM</b>	30 Sept 2020	30 Sept 2020	Video Conference		
		<b>Rapat Koordinasi Dukungan Insentif Fiskal dan Nonfiskal untuk Realisasi Proyek Coal to Methanol di Batuta Chemical Industrial Park</b>	24 Juni 2020	24 Juni 2020	Video Conference		
		<b>Rapat Koordinasi Penyiapan Revisi Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 dan Transisi pengelolaan Extractive Industries Transparency Initiative (EITI)</b>	16 Juli 2020	17 Juli 2020	Aston Imperial Hotel, Bekasi		
		<b>Rapat Koordinasi Pengembangan dan Pemanfaatan Industri Ekstraksi Logam Tanah Jarang di Indonesia</b>	6 Juli 2020	6 Juli 2020	Video Conference		
		<b>Rapat Koordinasi HPAL Tailing : PT Huayou dan QMB</b>	23 Sept 2020	23 Sept 2020	Video Conference		

Sumber: Laporan Kegiatan di Aplikasi SIK-M, Bulan Januari s.d September 2020.